

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

---



**MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GUNA  
MEMPERKUAT SISTEM PERTAHANAN IBU KOTA NEGARA**

**Oleh:**

**HELDI WIRA, S.I.P., M.SI  
KOLONEL INF NRP. 11940019030871**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERORANGAN (TASKAP)  
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXVI  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Assalaamualaikum Wr. Wb., salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul ***“Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Guna Memperkuat Sistem Pertahanan Ibu Kota Negara”***.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang Pengangkatan Tutor Taskap kepada para peserta PPRA untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA di Lemhannas RI tahun 2024. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Bapak Marsda TNI (Purn) Baskoro Alrianto, M.Sc. dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini. Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan Bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalaamualaikum Wr. Wb.

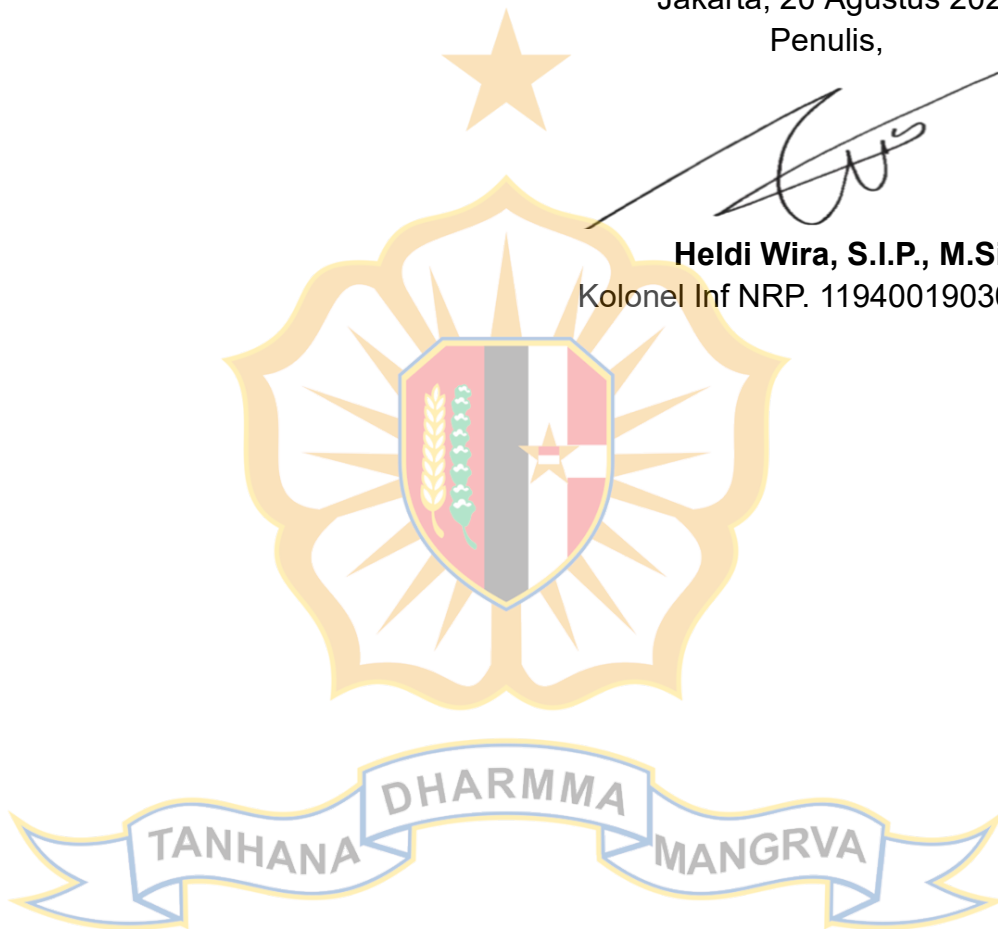
Jakarta, 20 Agustus 2024

Penulis,



**Hedi Wira, S.I.P., M.Si.**

Kolonel Inf NRP. 11940019030871



### PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heldi Wira, S.I.P., M.Si  
Pangkat : Kolonel Infanteri  
Jabatan : Pamen Denma Mabasad  
Instansi : Mabas TNI AD  
Alamat : JL. Ermawar No.12 Bandung

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI tahun 2024 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis ini adalah asli; dan
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus Pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, 20 Agustus 2024  
Penulis Taskap,



**Heldi Wira, S.I.P., M.Si.**

Kolonel Inf NRP. 11940019030871

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIC INDONESIA

---

**DAFTAR ISI**

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah .....	6
3. Maksud dan Tujuan .....	7
4. Ruang Lingkup dan Sistematika .....	7
5. Metode dan Pendekatan .....	9
6. Pengertian .....	9
<b>BAB II. LANDASAN PEMIKIRAN</b> .....	<b>11</b>
7. Umum .....	11
8. Peraturan Perundang-undangan .....	12
9. Data dan Fakta .....	15
10. Kerangka Teoritis .....	22
11. Lingkungan Strategis .....	24

<b>BAB III. PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
12. Umum .....	31
13 Implementasi dan tantangan pemberdayaan sosial masyarakat pada sistem pertahanan Ibu Kota Negara .....	33
14. Dampak pemberdayaan masyarakat dalam sistem pertahanan Ibu Kota Negara .....	44
15. Upaya-upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat guna memperkuat sistem pertahanan Ibu Kota Negara ....	51
<b>BAB IV. PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
16. Simpulan .....	64
17. Rekomendasi .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN:</b>	
1. ALUR PIKIR	
2. DAFTAR GAMBAR	
3. DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Keberadaan Ibu Kota Negara adalah area penting yang harus dilindungi dari berbagai ancaman karena merupakan pusat dari kegiatan pemerintahan, ekonomi, dan berbagai aktivitas lain yang bertujuan untuk mencapai cita-cita nasional yang tercantum dalam UUD 1945. Ibu Kota Negara, yang sebelumnya berada di Jakarta, dianggap sebagai titik berat *Center of Gravity* (CoG) dan menghadapi sejumlah masalah, seperti konsentrasi penduduk Indonesia sebanyak 57% di Pulau Jawa dan kontribusi Pulau Jawa sebesar 59% terhadap PDB, yang mengakibatkan adanya ketimpangan pendapatan yang signifikan dengan daerah lain di Indonesia. Selain itu, Jakarta juga mengalami krisis air, urbanisasi yang tinggi, serta kerentanan terhadap bencana alam lainnya.<sup>1</sup> Situasi ini dinilai tidak mendukung tercapainya tujuan nasional, sehingga pemerintah mengambil langkah strategis dengan melakukan kajian untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur, yang kini disebut sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pemilihan wilayah baru sebagai Ibu Kota Negara berbasis pada pertimbangan yang luas, mencakup aspek politik, ekonomi, sosial-budaya, serta pertahanan dan keamanan. Berdasarkan kebijakan pemerintah dalam pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), sistem pertahanan yang diadopsi adalah pertahanan semesta (total defense) yang bersifat terpadu, disertai dengan pendekatan deterrence, defensif aktif, dan strategi pertahanan berlapis. Ini mengindikasikan bahwa pendirian sistem pertahanan tidak hanya mengandalkan kekuatan tiga matra TNI—yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara—tetapi juga mengharapkan partisipasi aktif dari semua komponen bangsa dalam mewujudkan pertahanan semesta. Kebijakan ini harus dimengerti secara mendalam mengingat pembangunan sistem pertahanan di Ibu Kota

---

<sup>1</sup> Bappenas. (2021). Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara. Jakarta: Bappenas, h.32.

Negara didasarkan pada ancaman yang kompleks dan berkembang, memerlukan pendekatan yang multidimensional dalam penanganannya.

Menurut Kemenko Polhukam RI, IKN harus dipersiapkan untuk menghadapi berbagai ancaman dengan pendekatan pertahanan berlapis. Ini menggabungkan *hard defense* dan *soft defense*, menekankan sinergi antara kekuatan militer dan upaya pertahanan nirmiliter. Ini adalah konsep "*smart defense*" yang diusung untuk menjaga keutuhan dan keamanan IKN sebagai jantung baru Indonesia.<sup>2</sup> Oleh karena itu, seharusnya Indonesia mempunyai sistem pertahanan yang baik guna mendukung proses berjalannya tata kelola pemerintahan terutama dengan memberdayakan masyarakat dalam mendukung tercapainya tujuan yang diharapkan. Dengan memberdayakan masyarakat dalam sistem pertahanan memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari warga negara, sehingga meningkatkan legitimasi dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah.

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya dapat memperkuat rasa solidaritas nasional dan kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang ada. Salah satunya dapat diwujudkan melalui pelatihan dan kerjasama dalam konteks pertahanan, masyarakat dari berbagai latar belakang dapat merasa saling terhubung dan bersatu dalam mendukung kepentingan negara. Secara garis besar, terdapat dua hal penting mengapa perlu untuk melakukan pemberdayaan pertahanan dalam konteks membangun pertahanan di wilayah Ibu Kota Negara, yaitu: keterlibatan seluruh komponen bangsa dan optimalisasi sumber daya manusia. Dalam upaya membangun sistem pertahanan semesta, diperlukan keterlibatan seluruh komponen bangsa. Pemberdayaan masyarakat memungkinkan untuk mengaktifkan partisipasi dari berbagai lapisan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga dan organisasi yang ada. Salah satu bentuk pemberdayaan tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan sarana teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) dalam memperkuat sistem pertahanan.

---

<sup>2</sup> <https://polkam.go.id/sebagai-center-of-gravity-negara-ikn-implementasikan-smart-defence/m> diakses pada 25 Maret 2024.



Pada dasarnya, pemberdayaan masyarakat di Indonesia dalam konteks sistem pertahanan adalah proses strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan warga dalam mendukung keamanan nasional. Proses ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari pendidikan, latihan, hingga pengembangan infrastruktur dan teknologi. Di sisi lain perlunya pemberdayaan tersebut karena masyarakat lokal memiliki pengetahuan yang berharga tentang lingkungan, budaya, dan dinamika sosial yang ada di sekitar mereka. Dengan melibatkan masyarakat dalam upaya pertahanan, sumber daya manusia dapat dioptimalkan untuk memahami dan menghadapi ancaman yang mungkin terjadi, serta untuk merancang strategi pertahanan yang efektif sesuai dengan konteks lokal. Dengan demikian, pendekatan pemberdayaan sosial masyarakat tidak hanya memperkuat sistem pertahanan secara fisik, tetapi juga memperkuat ketahanan dan kohesi sosial di dalam masyarakat sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan stabil di ibu kota baru tersebut.

Pentingnya pembangunan Ibu Kota Negara khususnya bidang pertahanan dengan memberdayakan masyarakat merupakan hal yang perlu dilakukan dalam upaya menjaga stabilitas di wilayah tersebut.<sup>3</sup> Deputi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat dan pihak Otorita IKN menginisiasi bentuk pemberdayaan masyarakat lokal di IKN dengan menyelenggarakan program-program pelatihan untuk masyarakat dengan tujuan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.<sup>4</sup> Selain itu langkah strategis ini sebagai bentuk membangun kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam memperkuat sistem pertahanan ibu kota negara serta meningkatkan kapasitas dan resiliensi nasional guna menghadapi berbagai ancaman yang semakin kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa membangun pertahanan tidak hanya terpusat dalam menghadapi ancaman militer namun juga non militer. Kepala Staf Kepresidenan

---

<sup>3</sup> <https://rmol.id/politik/read/2023/11/07/596322/menko-pmk-ikn-harus-pahami-kondisi-sosial-masyarakat-lokal>, diakses 1 Februari 2024

<sup>4</sup> <https://www.ikn.go.id/otorita-ikn-terus-tingkatkan-keterlibatan-budaya-lokal-dan-pemberdayaan-masyarakat>, diakses 1 Februari 2024.

Moeldoko juga menyampaikan diperlukan transformasi dalam pembangunan IKN dimana pembangunan pertahanan tidak hanya cukup dengan *hard defense* tetapi juga perlu *soft defense* sehingga terbangun keseimbangan di dalam menghadapi ancaman yang dinamis.<sup>5</sup>

Undang-undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara pada pasal 3 mengamanatkan bahwa pengelolaan sumber daya nasional untuk Pertahanan Negara bertujuan untuk mentransformasikan sumber daya manusia menjadi kekuatan Pertahanan Negara yang siap digunakan untuk kepentingan Pertahanan Negara. Dalam hal ini Kementerian Pertahanan telah melaksanakan pembentukan Komcad sejak 2021 hingga sekarang sebagai bentuk implementasi undang-undang tersebut.

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat sistem pertahanan Ibu Kota Negara Nusantara menuntut strategi yang komprehensif. Hal ini melibatkan pelatihan dan pembinaan SDM, seperti yang sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, yang berkolaborasi dengan Satpol PP dan Linmas. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman, menumbuhkan rasa kebangsaan, dan menguatkan komponen pendukung pertahanan negara melalui peningkatan kemampuan dan pola pikir SDM.<sup>6</sup> Meskipun upaya pemberdayaan masyarakat oleh Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI telah membawa kemajuan, masih ada kebutuhan untuk meningkatkan langkah-langkah ini lebih lanjut. Pemberdayaan masyarakat di Ibu Kota Negara Nusantara harus mencakup pengembangan infrastruktur pertahanan yang lebih maju, peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pertahanan, serta integrasi teknologi canggih dalam sistem pertahanan. Ini akan membantu

---

<sup>5</sup> <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/11/30/ksp-ikn-membutuhkan-sistem-pertahanan-cerdas>, diakses 1 Januari 2024.

<sup>6</sup> <https://www.kemhan.go.id/poehan/2019/07/25/pemberdayaan-sdm-bersama-satpol-pp-dan-linmas.html>, diakses pada 25 Maret 2024.

menciptakan sistem pertahanan yang lebih resilien dan adaptif terhadap ancaman yang dinamis.

Jika diperhatikan pembangunan sistem pertahanan Ibu Kota Negara masih dominan pada sisi militer yakni pembangunan satuan-satuan, alutsista, kesiapan personel dan lain sebagainya sedangkan sisi non militer terutama pemberdayaan sosial masyarakat masih tergolong terbatas. Padahal sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa faktor masyarakat juga merupakan elemen penting di dalam mewujudkan sistem pertahanan khususnya di wilayah Ibu Kota Negara. Oleh sebab itu maka sudah selayaknya keberadaan masyarakat mampu diberdayakan dengan sebaik-baiknya.

Dalam perkembangan tersebut, meskipun terdapat upaya-upaya yang jelas untuk melibatkan masyarakat dalam memperkuat sistem pertahanan Ibu Kota Negara ternyata masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi dan pertimbangkan sebelum merumuskan kebijakan pemberdayaan. Salah satu tantangan utamanya mencakup kesesuaian program dengan kondisi lokal yang memerlukan pemetaan mendalam tentang situasi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat di Kalimantan Timur. Selain itu, saat ini masih kurangnya kebijakan spesifik untuk pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pertahanan dan rendahnya kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam upaya keamanan nasional menjadi hambatan signifikan. Tantangan lain termasuk ketimpangan sosial dan ekonomi, manajemen konflik sosial, serta integrasi antara komunitas lokal dan pendatang, yang semuanya memerlukan pendekatan yang sensitif dan terkoordinasi. Di sisi lain, perubahan demografi dan peningkatan kerawanan keamanan akibat dinamika sosial yang berubah juga menuntut strategi pencegahan dan penanggulangan yang efektif. Upaya untuk melestarikan budaya dan identitas lokal, memastikan kesinambungan program pemberdayaan, serta mengatasi tantangan sinergitas berbagai sektor institusi dan lembaga juga menjadi faktor penting yang perlu untuk dipertimbangkan.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan kebijakan yang holistik dan terintegrasi, serta dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat itu sendiri. Hal ini menuntut adanya komitmen yang lebih kuat dan kerjasama yang lebih baik antara pemerintah, militer, dan masyarakat sipil untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut yakni dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat guna memperkuat sistem pertahanan Ibu Kota Negara. Dengan membekali masyarakat dengan kemampuan deteksi dini dan respons terhadap ancaman, mereka dapat berfungsi sebagai barisan pertahanan pertama yang mendukung aparat keamanan. Hal ini bukan hanya meningkatkan kesiapsiagaan kolektif, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis, yang pada gilirannya memperkuat fondasi sosial untuk pembangunan jangka panjang IKN. Selain itu, pemberdayaan masyarakat berperan dalam mencegah konflik sosial dan meningkatkan solidaritas di antara warga. Di tengah pertumbuhan pesat dan perubahan demografi yang diakibatkan oleh migrasi dan pembangunan infrastruktur baru, potensi ketegangan antar kelompok dapat meningkat. Pemberdayaan masyarakat melalui program-program pendidikan, pelatihan, dan kegiatan komunitas membantu membangun rasa saling percaya dan solidaritas. Ini mengurangi risiko konflik dan meningkatkan kohesi sosial, yang esensial untuk menjaga stabilitas di IKN. Dengan masyarakat yang berdaya dan berpartisipasi aktif dalam sistem pertahanan, keamanan IKN dapat terjaga dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

## **2. Rumusan Masalah**

Ibu Kota Negara Ibu Kota Negara perlu didukung dengan berbagai komponen yang ada termasuk masyarakat. Dalam konteks pertahanan ibu kota, pemberdayaan masyarakat tidak hanya menguatkan aspek militer dan fisik pertahanan tetapi juga aspek sosial dan psikologis yang memberikan fondasi yang kuat untuk keamanan nasional. Namun demikian pemberdayaan masyarakat tersebut masih menyisahkan

berbagai persoalan sehingga perlu mendapatkan perhatian serius agar mampu memperkuat sistem pertahanan ibu kota negara. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah yang akan diutarakan adalah: **"Bagaimana meningkatkan pemberdayaan masyarakat guna memperkuat sistem pertahanan ibu kota negara?"**. Mengacu rumusan masalah tersebut yang ada maka dapat beberapa pertanyaan kajian yang diajukan, antara lain:

- a. Bagaimana implementasi dan tantangan pemberdayaan sosial masyarakat pada sistem pertahanan Ibu Kota Negara?
- b. Apa dampak pemberdayaan masyarakat dalam sistem pertahanan Ibu Kota Negara?
- c. Bagaimana upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat guna memperkuat sistem pertahanan Ibu Kota Negara?

### 3. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud.** Secara umum maksud penulisan taskap ini yaitu memberikan gambaran dan menganalisis perihal meningkatkan pemberdayaan masyarakat guna memperkuat sistem pertahanan Ibu Kota Negara.
- b. **Tujuan.** Taskap ini bertujuan untuk dijadikan sebagai pengembangan pengetahuan sekaligus bagian masukan konseptual maupun strategis kepada para pemangku kebijakan terutama berkaitan dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat guna memperkuat sistem pertahanan Ibu Kota Negara.

### 4. Ruang Lingkup dan Sistematika

- a. **Ruang Lingkup.** Penulisan taskap ini dibatasi pada upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya pada bidang Pertahanan di Ibu Kota Negara. Dengan pembatasan tersebut maka dapat dipahami berbagai upaya yang dilakukan terutama di dalam mendukung sistem pertahanan yang kuat melalui pemberdayaan masyarakat.

**b. Sistematika.** Penulisan taskap ini terbagi atas beberapa bagian, yaitu:

1) Bab I Pendahuluan. Pada bab ini dikemukakan berbagai gambaran perihal kondisi pembangunan IKN khususnya aspek pertahanan yang salah satunya dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat. Bab ini juga menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan, metode dan pendekatan yang digunakan, serta beberapa pengertian yang berkaitan dengan naskah dimana hal ini dibutuhkan agar mampu memberikan pemahaman atas naskah.

2) Bab II Landasan Pemikiran. Bab ini memuat dasar-dasar pemikiran penulis, yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Taskap, yaitu: peraturan perundang-undangan, data dan fakta, kerangka teoritis serta lingkungan strategis baik dalam lingkup global, regional dan nasional yang berkaitan dengan analisis tulisan ini.

3) Bab III Pembahasan. Bab ini menjelaskan mengenai implementasi dan tantangan pemberdayaan sosial masyarakat pada sistem pertahanan Ibu Kota Negara, dampak pemberdayaan masyarakat dalam sistem pertahanan Ibu Kota Negara, dan upaya-upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat guna memperkuat sistem pertahanan Ibu Kota Negara.

4) Bab IV Penutup. Bab ini berisi simpulan dari keseluruhan pembahasan dan rekomendasi penulis terhadap kebijakan strategis mengenai variabel-variabel pembahasan dan disesuaikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kajian.



## 5. Metode dan Pendekatan

a. **Metode.** Penyusunan naskah ini menggunakan metode analisis deskriptif yakni merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena, peristiwa, atau kondisi subjek penelitian secara sistematis, faktual, dan akurat. Dalam metode ini pengumpulan dan analisis data serta fakta didasarkan pada data sekunder dan/atau data primer.

b. **Pendekatan.** Pendekatan taskap yang digunakan yaitu perspektif ketahanan nasional dengan analisis multidisiplin ilmu sesuai kerangka teoritis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan berdasarkan data/fakta yang ada guna memperkuat sistem pertahanan melalui pemberdayaan masyarakat.

## 6. Pengertian

a. **Sistem** adalah seperangkat atau sekumpulan unsur yang saling terkait dan terintegrasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan.<sup>7</sup>

b. **Pertahanan** adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.<sup>8</sup>

c. **Pemberdayaan** adalah proses strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, keterlibatan, dan kemandirian individu atau kelompok dalam mengatasi tantangan, memanfaatkan peluang, dan mengambil bagian secara aktif dalam pembangunan dan perubahan di lingkungannya.<sup>9</sup>

d. **Masyarakat** adalah sekelompok manusia yang menempati suatu wilayah dimana saling bergaul atau berinteraksi sehingga

---

<sup>7</sup> Gordon B. Davis. (2012). Analisis Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi, h. 24.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Pasal 1 Ayat 1.

<sup>9</sup> <https://promkes.kemkes.go.id/?p=1490>, diakses pada 25 Maret 2024.

terbangun suatu kebiasaan, sikap dan perasaan untuk bersama-sama dalam mencapai tujuan tertentu.<sup>10</sup>

e. **Pemberdayaan Masyarakat** adalah proses meningkatkan kapasitas individu dan kelompok dalam masyarakat untuk mengambil kendali atas kehidupan mereka dan membuat keputusan yang memengaruhi kesejahteraannya.<sup>11</sup>

f. **Meningkatkan** adalah tindakan membuat sesuatu menjadi lebih tinggi, besar, kuat, atau lebih baik dari sebelumnya.<sup>12</sup>

g. **Kerjasama** adalah proses di mana dua atau lebih individu atau kelompok bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya. Kerjasama dapat terjadi dalam berbagai konteks, mulai dari kerjasama antar individu dalam tim, antar departemen dalam sebuah organisasi, sampai antar negara.<sup>13</sup>

h. **Ancaman** adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.<sup>14</sup>

i. **Ibu Kota Negara** adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai IKN, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 dan Angka 2 dari UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. IKN berperan sebagai pusat administrasi pemerintahan negara, tempat di mana berbagai lembaga pemerintah pusat, termasuk kantor presiden, kementerian, parlemen, dan badan-badan negara lainnya.<sup>15</sup>

<sup>10</sup> Koentjaraningrat. (2009). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta, h. 51.

<sup>11</sup> Adi Rukminto. (2013). Intervensi Komunitas Dan Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, h.25.

<sup>12</sup> Abdurahmat Fathoni. (2005). Antropologi Sosial Budaya. Jakarta: Rineka Cipta, h.57.

<sup>13</sup> Lewis Thomas dan Elaine B. Johnson. (2014). *Contextual Teaching Learning*. Jakarta: Kaifa, h. 73.

<sup>14</sup> UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 1 ayat 22..

<sup>15</sup> *Ibid*.



## **BAB II**

### **LANDASAN PEMIKIRAN**

#### **7. Umum**

Dalam membangun sistem pertahanan khususnya di Ibu Kota Negara tentu membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, seperti TNI-Polri, Pemerintah Pusat dan Daerah, swasta hingga masyarakat. Hal ini menunjukkan dalam membangun pertahanan tidak hanya berkenaan dengan melibatkan unsur militer namun juga non militer yakni masyarakat. Keberadaan masyarakat memiliki peran strategis yakni dalam memperkuat pertahanan IKN salah satunya dengan berpartisipasi dalam kegiatan pengawasan lingkungan. Dengan terlibat aktif dalam pengawasan, masyarakat dapat membantu mengidentifikasi dan mencegah tindak kejahatan atau gangguan yang mungkin terjadi. Selain itu kerjasama antara masyarakat dengan aparat keamanan setempat, seperti polisi dan militer, adalah kunci dalam memperkuat sistem pertahanan IKN. Melalui kolaborasi ini, informasi penting tentang kondisi wilayah dapat disampaikan dengan cepat dan tepat, sehingga memungkinkan penanganan masalah secara efektif dan efisien.

Oleh karenanya meningkatkan pemberdayaan masyarakat merupakan kunci esensial dalam memperkuat sistem pertahanan Ibu Kota Negara, di mana setiap warga negara berperan aktif dalam membangun fondasi pertahanan nasional. Inisiatif ini tidak hanya mengarah pada pembentukan pertahanan yang lebih tangguh, tetapi juga mempromosikan partisipasi, kesadaran, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman terhadap kedaulatan negara. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat dalam konteks ini tidak hanya tentang mempersiapkan individu dan komunitas untuk menghadapi ancaman, tetapi juga tentang membangun ekosistem yang tangguh, di mana setiap elemen masyarakat berkontribusi pada pertahanan untuk menjaga stabilitas Ibu Kota Negara. Berkenaan dengan hal tersebut, bab ini membahas tentang tinjauan peraturan dan perundang-undangan, data

dan fakta, kerangka teoritis, serta lingkungan strategis yang terkait erat dengan judul penelitian.

## **8. Peraturan Perundang-undangan**

a. **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.** Pasal 1 ayat 2 menguraikan tentang sistem pertahanan negara yang bersifat semesta, melibatkan semua warga negara, wilayah, dan semua sumber daya nasional, serta disiapkan secara dini oleh pemerintah. Sistem ini dijalankan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari berbagai ancaman. Sementara itu, Pasal 4 menyatakan bahwa tujuan dari pertahanan negara adalah untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa dari semua bentuk ancaman. Undang-undang ini menjadi landasan untuk melibatkan berbagai unsur, termasuk pemberdayaan masyarakat dalam membangun sistem pertahanan sebagaimana yang diharapkan.

b. **Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.** Pasal 1 ayat 12 menjelaskan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan, program serta kegiatan-kegiatan yang diperuntukkan sesuai kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam konteks ini mencakup berbagai aspek, seperti pendidikan, pelatihan, pembangunan infrastruktur, serta dukungan ekonomi yang dapat membantu masyarakat menjadi lebih mandiri dan mampu berkontribusi lebih efektif dalam pertahanan nasional. Hal ini juga mencakup partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan.

c. **Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.** Pasal 1 ayat 5 menegaskan urusan Pemerintahan pada dasarnya merupakan kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden dibantu kementerian negara serta penyelenggaraannya dilakukan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Dalam konteks ini dititikberatkan pada pemberdayaan masyarakat dilakukan pemerintah daerah melalui program-program tertentu seperti pendidikan pertahanan serta program peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan terhadap isu pertahanan dan keamanan. Pemberdayaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya pasif dalam menghadapi ancaman, tapi juga aktif berkontribusi dalam sistem pertahanan negara. Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa urusan pertahanan tidak hanya terbatas pada aspek militer, tapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan pemerintah di semua tingkatan.

d. **Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.** Pasal 3 dari UU ini menyatakan bahwa tujuan utama pengelolaan sumber daya nasional adalah untuk mengubah sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional menjadi kekuatan pertahanan yang mampu digunakan untuk kepentingan pertahanan nasional. Regulasi tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya nasional yang efektif menjadi sangat krusial mengingat kompleksitas dan pentingnya wilayah Ibu Kota Negara. Melalui pemberdayaan ini diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan sistem pertahanan yang tangguh dengan memastikan bahwa sumber daya manusia dan aset nasional lainnya diintegrasikan serta dimanfaatkan secara strategis untuk

menghadapi ancaman, meningkatkan ketahanan, dan mendukung operasi pertahanan negara.

e. **Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.** Regulasi ini menetapkan ketentuan tentang pembentukan dan operasional Ibu Kota Nusantara, yang akan berfungsi sebagai pusat aktivitas pemerintahan nasional serta menjadi lokasi bagi perwakilan negara asing dan berbagai organisasi atau lembaga internasional. Pasal 2 dari regulasi ini menjabarkan bahwa visi dari Ibu Kota Nusantara adalah menjadi kota global yang inklusif, menjadi penggerak utama ekonomi Indonesia di masa depan, dan menjadi simbol identitas nasional yang menunjukkan keragaman Indonesia, yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Pasal 3 menekankan bahwa pembentukan dan implementasi undang-undang ini berlandaskan pada prinsip-prinsip seperti ketuhanan, perlindungan, kemanusiaan, kebangsaan, keindonesiaan, keunikan dalam keragaman, keadilan, kesetaraan di depan hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, harmoni, konsistensi, serta efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan. Sebagai negara yang memiliki berbagai keberagaman atas masyarakatnya maka sudah selayaknya pembangunan Ibu Kota Negara perlu memberdayakan guna memperkuat sistem pertahanan agar terwujud stabilitas nasional.

f. **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.** Pasal 41 menjelaskan masyarakat memiliki peran meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik. Keberadaan masyarakat dalam hal ini sangat diperlukan agar pemanfaatan TIK mampu dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Dalam konteks ini pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan

teknologi informasi dan sistem elektronik, Ibu Kota Negara dapat memperkuat sistem pertahanan dan resiliensinya terhadap berbagai ancaman, termasuk ancaman siber, yang memerlukan respons cepat dan koordinasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan.

g. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.**

Pasal 3 poin g dijelaskan salah satu kerangka implementasi dalam IKN yakni partisipasi masyarakat. Ini berarti bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan dan pengelolaan IKN tidak hanya bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan berdaya, tetapi juga untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan ibu kota baru. Pemberdayaan masyarakat dalam konteks ini mencakup peningkatan kapasitas individu dan komunitas dalam memahami, berkontribusi, dan bertanggung jawab atas pertahanan dan keamanan wilayah mereka, yang pada akhirnya memperkuat ketahanan nasional secara keseluruhan.

9. **Data dan Fakta**

a. **Kondisi masyarakat lokal di wilayah Ibu Kota Negara.**

Secara umum kondisi masyarakat lokal di wilayah Kalimantan Timur terdiri atas budaya dan kearifan lokal yang beragam. Kalimantan Timur merupakan rumah bagi berbagai suku dan etnis, termasuk Dayak, Banjar, Kutai, Berau, dan suku-suku lainnya. Kondisi menunjukkan bahwa budaya dan kearifan lokal Kalimantan Timur cukup terbuka atas budaya-budaya lainnya sehingga dapat mendukung di dalam mewujudkan pembangunan IKN yang berkelanjutan. Setiap suku memiliki tradisi, bahasa, adat istiadat, dan kepercayaan yang unik. Salah satu aspek budaya yang mencolok di Kalimantan Timur adalah seni dan pertunjukan tradisional. Seni tari, musik, dan teater tradisional masih hidup di

antara masyarakat lokal. Contohnya adalah tari Baksa Kembang dari suku Dayak dan tari Zapin dari suku Banjar. Musik tradisional seperti sape juga merupakan bagian tak terpisahkan dari budaya Kalimantan Timur.<sup>16</sup>

Keberadaan kearifan lokal sebagai pusat nilai dan norma kehidupan penduduk memiliki beberapa aspek yang mencakup nilai-nilai kerukunan antar-manusia, yang tercermin dalam petuah nenek moyang yang disosialisasikan kepada masyarakat setempat, terutama di Kalimantan Timur, untuk mendukung keberagaman budaya. Berikut beberapa contoh kebudayaan dan kearifan lokal di Kalimantan Timur:<sup>17</sup>

- 1) Budaya Etnis Kutai. Erau merupakan proses integrasi antara Sultan dan rakyat dalam membangun dan menjaga Kerajaan Kutai.
- 2) Budaya Dayak Bahau. Konsep Murip ngenai (makmur sejahtera bersama) dan te ang hray (tinggal bersama dengan kompetisi yang sehat) memperkuat kerjasama dan kehidupan berdampingan yang harmonis.
- 3) Prinsip nilai-norma. Nilai seperti "Lain lubuk lain ikannya, dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung" dan "Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing" mengajarkan pentingnya hidup harmonis dan saling bahu-membahu.
- 4) Kerja sama: Konsep kayuh baimbai (bekerja sama) dan gawi sabumi (gotong royong) menjadi landasan dalam mencapai tujuan bersama dan menyelesaikan pekerjaan secara kolektif.
- 5) Keutuhan dan persatuan. Prinsip basusun sirih menggarisbawahi pentingnya kebersamaan, persatuan, dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari.

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1994). Sejarah Kebudayaan Kalimantan. Jakarta: CV. Dwi Jaya Karya, h. 32.

<sup>17</sup> Ahmad H. Jubaidi, dkk. 2018. Pencegahan Paham Terorisme dan Radikalisme Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Kalimantan Timur. Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum, Vol 1, No. 1.



- 6) Introspeksi diri. Menyisir sisi tapih adalah refleksi diri yang mengajarkan pentingnya introspeksi dan penilaian terhadap diri sendiri.
- 7) Pelestarian hutan. Sistem simpukng dan bahasa Dayak Wehea (Keldung Laas Wehea Long Metgween) digunakan untuk melestarikan hutan dan sumber daya alam secara berkelanjutan.
- 8) Lahan tradisional. Masyarakat Dayak Tonyooi dan Benuaq memiliki "LEMBO" yang merupakan lahan luas dengan tanaman dan pohon buah-buahan yang ditanam oleh nenek moyang mereka, memberikan manfaat bagi generasi mendatang.
- 9) Hubungan dengan alam. Konsep Aruh dari Dayak Meratus mengajarkan keseimbangan dalam interaksi antara manusia dan alam.
- 10) Rekonsiliasi dan perdamaian. Bapatut dalam Bahasa Banjar adalah proses musyawarah dan rekonsiliasi untuk mencapai kesepakatan dan perdamaian.

Meski dengan keberagaman budaya dan kearifan lokal Kalimantan Timur yang masih dijalankan tersebut, namun penting untuk dicatat bahwa kondisi budaya dan kearifan lokal selalu berubah seiring dengan perkembangan zaman. Pengaruh globalisasi, urbanisasi, dan modernisasi dapat mempengaruhi dan mengubah beberapa aspek budaya tradisional. Maka sudah selayaknya kekayaan yang terdapat di Kalimantan Timur harus dipertahankan sebagai warisan budaya yang penting. Penting bagi IKN untuk memperhatikan pelestarian hutan, budaya, dan lingkungan, termasuk menjaga spesies hewan dan tumbuhan khas Kalimantan. Untuk itu masyarakat lokal dan kearifan agar tidak mengalami marginalisasi, seperti yang dialami oleh Suku Betawi di Jakarta. Menurutnya, aspek religi, kebangsaan, pengetahuan, dan kearifan lokal harus terintegrasi dalam pendidikan agar generasi

muda tidak menjadi pragmatis. Selain itu, dalam relokasi masyarakat lokal yang akan terjadi di IKN, Otorita IKN harus memperhatikan tiga aspek kebudayaan, yaitu artefak, mentifak, dan sosiofak, agar kebudayaan masyarakat lokal tetap terjaga.<sup>18</sup>

b. **Ancaman dan gangguan di Ibu Kota Negara (Kalimantan Timur).** Data Statistik Kriminal 2018 dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Kalimantan Timur merupakan salah satu dari sepuluh provinsi dengan tingkat konflik massal yang rendah di tahun 2017. Persentase desa atau kelurahan di Kalimantan Timur yang mengalami konflik massal hanya sekitar 1,64%, menduduki peringkat ke-10 terendah di seluruh Indonesia dengan jumlah konflik massal sebanyak 17 kejadian. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan provinsi lain di Kalimantan, tingkat konflik massal di Kalimantan Timur masih lebih tinggi. Kalimantan Tengah adalah provinsi dengan tingkat konflik massal terendah di Kalimantan dan terendah ketiga di seluruh Indonesia, dengan persentase konflik massal sebesar 0,82%. Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan memiliki tingkat konflik massal masing-masing sekitar 1,04% dan 1,05%, sementara Kalimantan Barat menduduki posisi kesembilan terendah dengan persentase konflik massal sekitar 1,4%. Jenis konflik massal ini mencakup berbagai perkelahian, termasuk antar kelompok warga, antar desa/kelurahan, dengan aparat keamanan, dengan aparat pemerintah, antar pelajar, dan antar suku.<sup>19</sup>

Sementara di Samarinda, yang merupakan kota terpadat di Kalimantan Timur, terdapat potensi tinggi untuk konflik sosial. Terjadi peningkatan angka konflik dari tahun ke tahun, meliputi konflik sosial, ekonomi, dan politik, serta ancaman terorisme yang

<sup>18</sup> <https://mediaindonesia.com/nusantara/557947/sesuai-budaya-dan-kearifan-lokalnya-kaltim-siap-berpartisipasi-bangun-ikn>, diakses pada 26 Maret 2024.

<sup>19</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/27/konflik-massal-kalimantan-timur-lebih-tinggi-dibandingkan-wilayah-kalimantan-lainnya>, diakses pada 27 Maret 2024.



merupakan pola konflik yang baru muncul. Konflik tersebut sebagian besar dipicu oleh masalah ekonomi, sosial, dan politik, yang kemudian dikaitkan dengan faktor etnis dan agama untuk mendapatkan dukungan dari kelompok masyarakat. Konflik sosial sering kali melibatkan mobilisasi organisasi massa (ormas), yang dapat berujung pada benturan fisik, seperti yang terjadi pada tahun 2005 dan 2015. Konflik serupa juga terjadi di daerah lain seperti Sambas dan Sampit, yang berkaitan erat dengan faktor etnis. Berdasarkan Polresta Samarinda, konflik di kota ini memiliki beragam akar, termasuk masalah politik, ekonomi, sosial-budaya, dan potensi terorisme. Konflik terkait dengan sumber daya ekonomi, seperti pertambangan, lahan, dan harga barang kebutuhan sehari-hari, serta perbedaan kebijakan yang kurang pro-rakyat. Ada juga konflik yang muncul dari perbedaan budaya dan agama dalam pemahaman dan pembangunan tempat ibadah. Semua ini menggambarkan kompleksitas konflik sosial di Samarinda, yang mencakup akar konflik kepentingan, pemahaman, dan keyakinan.<sup>20</sup>

Secara keseluruhan, Dalam membangun sistem pertahanan yang menyeluruh di Ibu Kota Negara, perlu mempertimbangkan berbagai jenis ancaman yang mungkin terjadi di darat, laut, dan udara. Ancaman meliputi sengketa batas wilayah dengan Malaysia, kekuatan militer Malaysia yang dekat dengan IKN, potensi konflik sosial di Kalimantan, ancaman terorisme, bencana alam, pelanggaran wilayah laut, dan konflik di Laut Cina Selatan. Ancaman juga dapat datang melalui jalur udara dengan penerbangan ilegal dan penggunaan wilayah udara internasional. Dalam membangun sistem pertahanan yang efektif, perlu mengambil langkah-langkah antisipasi yang sesuai dengan ketiga matra TNI dan mempertimbangkan ancaman potensial dari perspektif militer dan nonmiliter. Selain itu, pemindahan IKN ke

---

<sup>20</sup> <https://kaltim.antaranews.com/berita/143685/konflik-perkebunan-di-provinsi-kaltim-tergolong-tinggi>, diakses pada 27 Maret 2024.

Kalimantan Timur juga harus mempertimbangkan potensi konflik sosial yang dapat timbul akibat perubahan demografi dan sosial di wilayah tersebut. Dengan pendekatan yang komprehensif, keamanan dan pertahanan di IKN dapat dijaga dengan baik.<sup>21</sup>

c. **Data Demografi Kalimantan Timur dan Potensi Pertumbuhan Penduduk Kalimantan Timur Pasca Pemindahan Ibu Kota.** Data dari Sensus Penduduk 2020 yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi fondasi untuk meramalkan pertumbuhan populasi di Kalimantan Timur sampai tahun 2050. Dalam data tersebut berusaha membahas potensi demografi penduduk di Kalimantan Timur dalam mendukung sistem keamanan regional. Pada tahun 2020, populasi di wilayah ini tercatat mencapai 3,75 juta orang. Hanya dalam satu tahun, angka tersebut naik ke 3,8 juta. Mengacu proyeksi BPS, akan terjadi penambahan penduduk sekitar 50 ribu orang pada tahun 2022, dimana total jumlah penduduk menjadi 3,85 juta.<sup>22</sup>

Di sisi lain, Tahap awal ASN dan komponen lain ke Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur yang dijadwalkan pada tahun 2024, diperkirakan akan berdampak positif terhadap sistem keamanan. Proyeksi penduduk menunjukkan mengalami peningkatan menjadi sekitar 4,04 juta orang pada tahun tersebut. Kondisi ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas keamanan daerah melalui penambahan sumber daya manusia yang terampil dan terlatih. Selain itu, proyeksi tersebut mengindikasikan pertumbuhan penduduk yang konsisten, dengan estimasi penambahan sekitar 200 ribu orang setiap tahun sejak dimulainya pemindahan ke IKN.<sup>23</sup> Hal ini memberikan peluang bagi Kalimantan Timur untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur

---

<sup>21</sup> Mabes TNI. (2022). Rencana Pembangunan Satuan TNI di IKN. Jakarta: Mabes TNI.

<sup>22</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/29/asn-pusat-bakal-dipindahkan-bertahap-ke-ikn-bagaimana-proyeksi-penduduk-di-kalimantan-timur>, diakses pada 25 Maret 2024.

<sup>23</sup> *Ibid.*

keamanan yang lebih baik, termasuk fasilitas keamanan, pusat pelatihan, dan sistem komunikasi yang lebih canggih.<sup>24</sup> Namun, proyeksi juga menunjukkan bahwa setelah tahun 2031, penambahan penduduk diperkirakan akan berkisar antara 50 hingga 100 ribu penduduk per tahun. Dalam jangka panjang, proyeksi BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2050, jumlah penduduk Kalimantan Timur diproyeksikan mencapai 6,7 juta orang.<sup>25</sup>

d. **Komponen cadangan di wilayah Kodam VI/Mulawarman.**

Komponen cadangan dan komponen pendukung di wilayah Kodam VI/Mulawarman telah mengalami perkembangan signifikan sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pertahanan di IKN Nusantara. Pada tahun 2024, Kementerian Pertahanan menargetkan rekrutmen sebanyak 1.000 personel Komcad di wilayah ini. Pendaftaran resmi dibuka dari 1 Mei hingga 7 Juni 2024, dengan persyaratan utama termasuk usia antara 18 hingga 35 tahun dan lulusan SMA/SMK. Rekrutmen ini bertujuan untuk melibatkan warga sipil dalam upaya pertahanan nasional, sekaligus memberikan pelatihan dasar militer selama tiga bulan.<sup>26</sup>

Selain Komponen cadangan, wilayah Kodam VI/Mulawarman juga mengaktifkan komponen pendukung yang terdiri dari sumber daya sipil yang dapat digunakan untuk mendukung tugas-tugas militer, terutama dalam menjaga keamanan dan stabilitas di sekitar IKN. Komduk ini berfungsi untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki peran dalam sistem pertahanan nasional. Sosialisasi dan pelatihan terkait Komduk juga dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> <https://sultra.antaranews.com/berita/459879/kemenhan-2024-target-rekrut-1000-komcad-melalui-kodam-vimulawarman>, diakses pada 25 Juni 2024.

keamanan.<sup>27</sup> Dengan adanya Komcad dan Komduk, partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan IKN menjadi lebih terstruktur dan terorganisir. Upaya ini tidak hanya memperkuat sistem pertahanan negara, tetapi juga mempromosikan kesadaran kolektif akan pentingnya kontribusi setiap individu dalam mempertahankan kedaulatan dan keamanan nasional.

e. **Data Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.**

Data Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur untuk tahun 2021-2023 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan dalam beberapa aspek. Salah satu aspek utama adalah jumlah aparat Satuan Pamong Praja (Satpol PP). Pada tingkat provinsi, jumlah aparat relatif stabil dari tahun 2021 hingga 2023, dengan hanya sedikit peningkatan dari 173 menjadi 174 orang. Namun, di tingkat kabupaten/kota, terjadi fluktuasi yang lebih tajam. Jumlah aparat meningkat dari 1052 orang pada tahun 2021 menjadi 1275 orang pada tahun 2022, tetapi kemudian menurun drastis menjadi 941 orang pada tahun 2023. Perubahan ini mungkin mencerminkan adanya perubahan kebijakan atau alokasi sumber daya di tingkat daerah. Di sisi lain, jumlah petugas perlindungan masyarakat menunjukkan tren yang sangat berbeda. Pada tingkat provinsi, jumlah petugas tetap stabil di angka 30 orang selama tiga tahun berturut-turut. Namun, di tingkat kabupaten/kota, terjadi penurunan drastis dari 22557 orang pada tahun 2021 menjadi hanya 782 orang pada tahun 2023. Penurunan ini bisa jadi mencerminkan adanya perubahan signifikan dalam strategi atau prioritas pemerintah daerah dalam upaya perlindungan masyarakat.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> <https://nusantaranews.info/sosialisasi-program-komponen-cadangan-komcad-matra-darat-2024-di-kodam-vi-mulawarman/>, diakses pada 24 Juni 2024.

<sup>28</sup> <https://data.kaltimprov.go.id/tr/dataset/data-keamanan-dan-ketertiban-masyarakat-provinsi-dan-kabupaten-kota-se-kaltim-tahun-2021-2023>, diakses pada 17 Agustus 2024.

Patroli petugas Satpol PP untuk pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) juga mengalami penurunan tajam. Dari 2793 patroli yang dilakukan pada tahun 2021, jumlah ini menurun drastis menjadi hanya 194 patroli pada tahun 2023. Penurunan jumlah patroli ini bisa menjadi indikasi penurunan aktivitas pengawasan atau perubahan dalam metode pemantauan yang digunakan oleh pemerintah daerah. Sementara terkait pelanggaran K3, jumlah kasus mengalami peningkatan dari 5172 kasus pada tahun 2021 menjadi 5958 kasus pada tahun 2022, namun kembali menurun menjadi 5377 kasus pada tahun 2023. Tingkat penyelesaian pelanggaran ini juga mengalami fluktuasi, dengan sedikit penurunan pada tahun 2023. Namun, rasio jumlah polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk meningkat signifikan dari 0,0077% pada tahun 2021 menjadi 9,09% pada tahun 2023, menunjukkan adanya upaya peningkatan pengawasan dan penegakan ketertiban di masyarakat.<sup>29</sup>

## 10. Kerangka Teoritis

Dalam penyusunan taskap ini beberapa teori yang digunakan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. **Pemberdayaan Masyarakat.** Istilah pemberdayaan masyarakat dimaknai oleh Max Weber dengan konsep kemungkinan tindakan yang mencakup gagasan bahwa individu memiliki kemampuan untuk bertindak secara mandiri dan mengubah situasi sosialnya.<sup>30</sup> Pemikiran ini menyiratkan bahwa pemberdayaan masyarakat terjadi ketika individu atau kelompok memperoleh kontrol atas kehidupan masyarakat sendiri. Dalam konteks ini pemberdayaan masyarakat dalam memperkuat sistem pertahanan ibu kota negara dapat diarahkan pada peningkatan

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Bryan S. Turner. (2012). Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h.115

partisipasi, kemandirian, dan kontrol masyarakat atas kebijakan dan tindakan yang memengaruhi keamanan dan pertahanan terutama di wilayah IKN. Hal ini mencakup pemberian wewenang kepada masyarakat setempat, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi, serta pembangunan semangat nasionalisme dan kesadaran akan pentingnya pertahanan nasional.

b. **Ancaman.** Ancaman dimaknai sebagai kondisi yang dapat membahayakan suatu wilayah negara baik berasal dari dalam maupun luar dimana hal tersebut dapat mengganggu kepentingan nasional.<sup>31</sup> Secara umum ancaman setidaknya dapat dipahami menjadi dua jenis yang berbeda, yaitu ancaman militer dan non-militer.<sup>32</sup> Ancaman militer merupakan ancaman yang berkaitan dengan kemampuan militer, biasanya pelakunya negara lain yang ingin menginvasi, berperang, atau menguasai suatu wilayah dan negara tertentu. Ancaman tersebut biasa didefinisikan sebagai ancaman tradisional, karena ditemukan dalam kondisi perang dengan menggunakan kekuatan militer. Sementara, ancaman non-militer didefinisikan sebagai ancaman menggunakan berbagai dimensi selain militer, termasuk ideologi, ekonomi, teknologi dan informasi, politik, dan sosial budaya, yang menyulitkan adalah menentukan aktor yang melakukan karena biasanya aktor non-negara dan juga kelompok yang merupakan masyarakat sipil. Dalam konteks ini penggunaan teori ancaman sangat diperlukan dalam membantu mengidentifikasi dan memahami berbagai jenis ancaman yang mungkin dihadapi oleh ibu kota negara, baik dari dalam maupun dari luar.

c. **Sistem Pertahanan Semesta.** Sistem Pertahanan Semesta (*Total Defence System*) merupakan suatu pandangan yang menilai bahwa pertahanan negara tidak hanya terbatas pada tugas dan tugas militer saja, tetapi juga melibatkan seluruh elemen dan unsur

---

<sup>31</sup> Craig A. Snyder. (1999). *Contemporary Security and Strategy*. Abingdon: Routledge, h. 12.

<sup>32</sup> *Ibid.*



dalam masyarakat. Konsep ini menekankan bahwa semua elemen dan unsur harus bekerja sama dan saling berkoordinasi untuk memastikan keamanan dan stabilitas nasional dan memenuhi tantangan dan ancaman keamanan yang semakin kompleks dan beragam. Menurut konsep ini, pertahanan nasional harus melibatkan seluruh elemen dan unsur masyarakat, seperti masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Setiap elemen dan unsur tersebut memiliki peran dan tugas masing-masing dalam memastikan keamanan dan stabilitas nasional.<sup>33</sup> Sistem pertahanan ini menekankan pentingnya partisipasi aktif seluruh masyarakat dalam upaya pertahanan, bukan hanya lembaga militer atau pemerintah saja. Untuk itu kerjasama antara berbagai entitas, termasuk sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil menjadi sangat diperlukan terutama di dalam menghadapi kompleksitas ancaman yang berkembang ibu kota negara.

## 11. Lingkungan Strategis

Dinamika lingkungan strategis pada dasarnya terus mempengaruhi pengembangan IKN baik secara langsung maupun tidak langsung. Kondisi lingkungan yang semakin tidak terduga dan tidak stabil menjadi ciri khas utama sehingga memerlukan pengelolaan yang baik agar dapat beradaptasi dengan perubahan yang ada. Dalam bagian ini dijelaskan secara singkat kondisi perkembangan lingkungan strategis berpengaruh dalam skala global, regional, dan nasional.

- a. **Global.** Perkembangan dinamis dari lingkungan strategis global telah memunculkan berbagai ancaman dan tantangan baru yang tidak terbatas pada aspek militer, tetapi juga melibatkan ancaman non-militer. Dengan globalisasi dan kemajuan teknologi, pola ancaman ini berubah secara cepat. Kemunculan Era Industri

---

<sup>33</sup> Setiyawan, W.B.M., Mantri, B.H. and Junaidi, A., 2020. Optimalisasi Sishankamrata Melalui Penerapan Lima Pilar Total Defence sebagai Upaya Mewujudkan Negara Indonesia yang Berdaulat. *Borneo Law Review*, Vol. 4, No.2.

4.0 dan transisi menuju 5.0 telah mempercepat proses modernisasi, terutama di negara-negara maju, yang menciptakan dilema keamanan. Hal ini mengharuskan negara-negara yang belum mengikuti perkembangan ini untuk menyesuaikan strategi dan kebijakan pertahanan dan keamanan mereka. Indonesia, misalnya, menghadapi berbagai tantangan global baik dari segi militer maupun non-militer, yang mencakup terorisme dan radikalisme global, risiko perang nuklir, kejahatan siber, bencana alam akibat perubahan iklim, dampak perang dagang antara AS dan Tiongkok, ketegangan di Timur Tengah, konflik Rusia-Ukraina, serta ketegangan antara Cina dan Taiwan dan ambisi Cina di Laut Cina Selatan. Selain itu, peran AS di kancah global juga berdampak signifikan terhadap stabilitas negara-negara lain, mengingat pengaruhnya cukup strategis terutama dalam bidang politik, ekonomi, dan pertahanan. Perkembangan global yang terjadi secara tidak langsung menuntut pelibatan masyarakat guna memperkuat sistem pertahanan di tengah dinamika yang terjadi.

b. **Regional.** Dalam lingkup regional, perkembangan di Laut China Selatan memiliki pengaruh signifikan terhadap konstelasi geopolitik dan geostrategi, terutama di kawasan tersebut. Hal ini diperparah dengan kerjasama antara Jepang dan Australia dalam menghadapi China di kawasan Asia Pasifik. Kerjasama ini termasuk peningkatan signifikan dalam anggaran pertahanan kedua negara. Australia telah meningkatkan alokasi dana pertahanannya hingga US\$ 186 miliar, naik 40 persen dari alokasi sebelumnya, termasuk penambahan kapasitas kapal selam nuklir.<sup>34</sup> Sementara itu, Jepang juga meningkatkan anggaran pertahanannya menjadi USD 865 miliar, yang mengalami kenaikan sebesar 26,3 persen dari tahun sebelumnya.<sup>35</sup> Peningkatan anggaran ini mencerminkan keseriusan

---

<sup>34</sup> <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200701231153-113-519804/australia-naikkan-anggaran-pertahanan-jadi-us-186-miliar>, diakses 21 April 2024.

<sup>35</sup> *Ibid.*



pemerintah Jepang dalam mengembangkan alutsista yang ada, yang pada gilirannya akan memperkuat sistem pertahanan mereka. Kondisi ini secara nyata mempengaruhi dinamika keamanan dan pertahanan di kawasan regional.

Dalam konteks regional, isu-isu seperti peredaran narkoba, penebangan liar, dan sengketa wilayah sering terjadi, mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara di kawasan Asia dan ASEAN. Hal ini juga berdampak pada dinamika politik domestik Indonesia. Untuk itu salah satu upaya yang perlu dilakukan yakni dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat guna memperkuat sistem pertahanan Ibu Kota Negara. Kepekaan dan partisipasi masyarakat tentang isu-isu regional dapat membantu memahami risiko serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperkuat pertahanan. Masyarakat yang terinformasi dan terlatih dapat membantu dalam deteksi dini ancaman dan penanggulangan ancaman yang dapat mengganggu stabilitas.

c. **Nasional.** Di tingkat nasional, Indonesia mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan strategis melalui pendekatan astagatra. Fokus utama dari pendekatan ini adalah pada aspek-aspek khusus yang memiliki pengaruh signifikan terhadap lingkungan strategis dalam negeri. Adapun beberapa aspek yang dimaksud dijelaskan sebagai berikut:

- 1) **Geografi.** Kabupaten Penajam Paser Utara, terletak di Kalimantan Timur, memiliki peran penting dalam konteks meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat sistem pertahanan Ibu Kota Negara baru. Secara geografis, Penajam memiliki posisi strategis yang berpengaruh dalam upaya tersebut. Berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara di utara, Selat Makassar dan Kota Balikpapan di timur, Kabupaten Paser di selatan, serta

Kabupaten Kutai Barat di barat, Penajam menjadi titik pertemuan yang krusial.<sup>36</sup> Wilayah ini menjadi jantung dari perpindahan Ibu Kota Negara, sehingga pemberdayaan masyarakat di sini memiliki dampak yang signifikan dalam memperkuat sistem pertahanan nasional.

2) **Demografi.** Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan populasi sebesar 178.681 jiwa pada tahun 2020 dan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,18 persen antara tahun 2010 hingga 2020, menunjukkan adanya potensi besar dalam jumlah penduduk yang dapat dilibatkan dalam upaya pemberdayaan.<sup>37</sup> Namun, dalam mengimplementasikan strategi pemberdayaan, perlu juga memperhatikan diversitas demografi yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara. Berbagai faktor seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan latar belakang sosial budaya masyarakat perlu dipertimbangkan dengan seksama. Dengan memahami dinamika demografi yang terjadi, strategi dapat disesuaikan agar tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan.

3) **Sumber Kekayaan Alam.** Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan potensi SKA yang meliputi produksi pertanian tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, lada, dan kakao, serta sektor pariwisata yang berkembang, menjadi titik fokus dalam upaya pemberdayaan.<sup>38</sup> Potensi SKA dalam produksi pertanian dan perkebunan memberikan peluang untuk mengembangkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ini tidak hanya menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan, yang pada

---

<sup>36</sup> <https://disbun.kaltimprov.go.id/halaman/potensi-daerah-kabupaten-penajam-paser-utara>, diakses pada 24 April 2024

<sup>37</sup> <https://regional.kompas.com/read/2022/04/02/134453778/profil-kabupaten-penajam-paser-utara?page=all>, diakses pada 24 April 2024.

<sup>38</sup> *Ibid.*

akhirnya juga berdampak pada sistem pertahanan melalui pelestarian lingkungan.

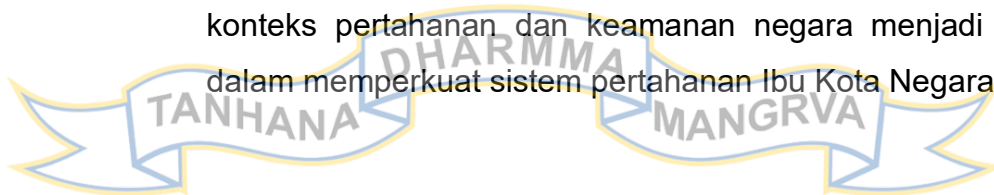
4) **Ideologi.** Ideologi Pancasila menjadi fondasi utama yang membentuk lingkungan strategi pemberdayaan masyarakat. Melalui pendidikan nilai-nilai Pancasila, organisasi kemasyarakatan berbasis Pancasila, dan penegakan nilai-nilai tersebut dalam proses kebijakan, masyarakat didorong untuk menjadi warga negara yang sadar akan pentingnya peran aktif dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Dengan memperkuat kesadaran kolektif dan keterlibatan aktif dalam nilai-nilai Pancasila, sistem pertahanan Ibu Kota Negara dapat menjadi lebih kokoh dan mengakar pada prinsip-prinsip moral dan filosofis yang mempersatukan bangsa.

5) **Politik.** lingkungan strategi yang berpengaruh secara politik melibatkan interaksi antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat sipil. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan dan pertahanan nasional harus memperhitungkan partisipasi serta aspirasi masyarakat. Melalui keterlibatan politik, seperti dialog publik, pemilihan umum, dan forum-forum partisipatif, masyarakat dapat memiliki suara dalam pembentukan kebijakan pertahanan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, partai politik memiliki peran penting dalam mewakili kepentingan masyarakat dan memperjuangkan agenda-agenda yang mendukung pemberdayaan masyarakat dalam konteks pertahanan.

6) **Sosial Budaya.** Dengan kehadiran beragam suku dan etnis seperti Dayak, Banjar, Kutai, dan Berau, terbentuklah sebuah masyarakat yang kaya akan tradisi, bahasa, adat istiadat, dan kepercayaan.. Kearifan lokal ini tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga memiliki

potensi besar dalam memperkuat sistem pertahanan. Nilai-nilai kerukunan antar-manusia, keberagaman budaya, dan penghormatan terhadap alam yang tercermin dalam budaya Kalimantan Timur dapat menjadi landasan bagi pemberdayaan masyarakat dalam konteks pertahanan.

7) **Pertahanan dan Keamanan.** Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat guna memperkuat sistem pertahanan Ibu Kota Negara, lingkungan strategi yang signifikan adalah konteks pertahanan dan keamanan negara. Aspek-aspek yang mempengaruhi termasuk integrasi komunitas dalam sistem pertahanan, partisipasi aktif dalam upaya pemantapan keamanan, dan peningkatan kesadaran akan ancaman serta strategi pertahanan. Komunitas yang terlibat secara aktif dalam pemantapan keamanan, seperti melalui kegiatan pengawasan lingkungan dan pelaporan potensi ancaman, dapat menjadi aset penting dalam mendukung sistem pertahanan nasional. Peningkatan kesadaran akan ancaman, baik yang bersifat militer maupun non-militer, juga memungkinkan masyarakat untuk mengambil langkah-langkah preventif dan responsif yang sesuai. Dengan demikian, integrasi masyarakat dalam konteks pertahanan dan keamanan negara menjadi kunci dalam memperkuat sistem pertahanan Ibu Kota Negara.



## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **12. Umum**

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya berfokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial, tetapi juga mencakup aspek keamanan dan stabilitas. Dengan memberdayakan masyarakat, kita tidak hanya membangun individu yang mandiri dan produktif, tetapi juga menciptakan komunitas yang tangguh dan siap menghadapi berbagai ancaman. Pemberdayaan ini melibatkan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah.

Pemberdayaan masyarakat menjadi semakin relevan dalam konteks pertahanan Ibu Kota Negara. Ketika masyarakat dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai khususnya jika perannya sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung, mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam sistem pertahanan. Partisipasi aktif ini meliputi kemampuan mendeteksi dini potensi ancaman, berkoordinasi dengan aparat keamanan, dan mengambil tindakan awal dalam situasi darurat. Dengan demikian, masyarakat yang berdaya akan berfungsi sebagai garda depan dalam menjaga keamanan dan stabilitas IKN. Selain itu, partisipasi masyarakat yang kuat dalam pertahanan wilayah juga dapat meringankan beban aparat keamanan, memungkinkan mereka untuk fokus pada ancaman yang lebih besar dan strategis.

Menghubungkan pemberdayaan masyarakat dengan upaya memperkuat sistem pertahanan Ibu Kota Negara menekankan pentingnya sinergi antara berbagai elemen masyarakat dan instansi terkait. Pemberdayaan yang efektif akan menciptakan masyarakat yang tidak hanya mampu melindungi diri sendiri tetapi juga berkontribusi secara aktif dalam upaya pertahanan nasional. Sistem pertahanan yang kuat dan terintegrasi dengan partisipasi masyarakat ini akan membentuk

lingkungan yang lebih aman dan stabil, mendukung kelancaran operasional IKN sebagai pusat pemerintahan dan administrasi.

Dalam menghadapi dinamika ancaman yang semakin kompleks, pemberdayaan masyarakat bukan hanya menjadi sebuah opsi, melainkan menjadi suatu kebutuhan yang tak terelakkan. Seiring dengan pergeseran Ibu Kota Negara ke wilayah Kalimantan Timur, terbuka peluang besar untuk membangun fondasi pertahanan yang kokoh dengan melibatkan peran aktif masyarakat dalam segala aspeknya. Dari penerapan strategi pertahanan berlapis hingga pengembangan infrastruktur pertahanan yang lebih maju, partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam menegakkan keamanan dan stabilitas di ibu kota baru. Dengan memahami peran krusial pemberdayaan masyarakat dalam mendukung sistem pertahanan, langkah-langkah selanjutnya dapat dirancang dengan lebih komprehensif dan efektif.

Dalam bab ini, akan dibahas secara mendalam mengenai pentingnya meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka memperkuat sistem pertahanan di Ibu Kota Negara. Fokus utama pembahasan meliputi implementasi dan tantangan yang dihadapi dalam pemberdayaan sosial masyarakat terkait dengan sistem pertahanan Ibu Kota Negara. Salah satu aspek yang akan dijelaskan adalah bagaimana masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam berbagai inisiatif pertahanan, serta hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi dalam proses ini. Selain itu, akan dijelaskan juga mengenai dampak yang dihasilkan dari pemberdayaan masyarakat dalam konteks sistem pertahanan Ibu Kota Negara, baik secara langsung maupun secara menyeluruh terhadap keamanan nasional. Dalam kerangka ini, akan diperhatikan bagaimana partisipasi masyarakat dapat menguatkan dan membentuk fondasi yang lebih kokoh bagi keberhasilan sistem pertahanan. Selanjutnya, pembahasan juga akan mencakup upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat guna memperkuat sistem pertahanan Ibu Kota Negara. Ini mencakup berbagai strategi dan program yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan dan kesadaran



masyarakat dalam mendukung upaya pertahanan, serta langkah-langkah konkret yang diambil untuk mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam proses ini. Dengan memahami secara komprehensif tantangan, dampak, dan upaya-upaya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam konteks pertahanan, diharapkan dapat dirancang langkah-langkah yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam memperkuat sistem pertahanan Ibu Kota Negara.

### **13. Implementasi dan tantangan pemberdayaan sosial masyarakat pada sistem pertahanan Ibu Kota Negara**

Pemerataan dan keadilan menjadi fokus utama dalam pembangunan sosial yang berkelanjutan, selaras dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, pembangunan IKN Nusantara diarahkan untuk menjadi pusat perekonomian nasional yang berkelanjutan, serta menjadi simbol identitas nasional yang mencerminkan keberagaman bangsa Indonesia.<sup>39</sup> Pemindehan pusat pemerintahan diharapkan mampu meredakan kesenjangan sosial, ekonomi, dan pembangunan antara wilayah Indonesia Barat dan Timur, yang penting untuk mewujudkan pembangunan nasional secara menyeluruh. Kesenjangan pembangunan antar wilayah di Indonesia ini perlu mendapat perhatian karena tidak hanya menciptakan perbedaan dalam tingkat kemajuan, tetapi juga berpotensi memunculkan ketidaksetaraan dan ketegangan sosial, serta gangguan terhadap keamanan dan stabilitas masyarakat, bahkan disintegrasi bangsa. Menanggapi kondisi tersebut, penekanan pada pemberdayaan masyarakat menjadi esensial untuk memastikan bahwa kondisi sosial yang dinamis dan beragam dapat dikelola dengan baik, sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pentingnya mengintegrasikan masyarakat lokal dalam proses pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara adalah tantangan tersendiri dalam pembangunan sosial yang sesuai dengan aspirasi dan

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

kebutuhan masyarakat setempat. Penyeragaman antara kebutuhan masyarakat lokal dengan rencana pembangunan memerlukan upaya yang cermat dan inklusif. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat lokal menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Maka dari itu, penting untuk mengimplementasikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Pasal 1 ayat 12 menjelaskan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan, program serta kegiatan-kegiatan yang diperuntukkan sesuai kebutuhan masyarakat.

Implementasi prinsip-prinsip kearifan lokal dan budaya dalam sistem keamanan IKN akan memungkinkan terwujudnya hubungan yang kuat dan saling mendukung antara pihak terkait, mengurangi ketegangan serta potensi konflik sosial, yang pada gilirannya akan mendukung tercapainya pembangunan. Integrasi aspek budaya, kearifan lokal, dan perlindungan lingkungan hidup dalam sistem keamanan IKN, sesuai dengan Peppres No. 63 Tahun 2022, akan memastikan tercapainya tujuan kewaspadaan nasional secara holistik sesuai dengan rencana induk pembangunan IKN.<sup>40</sup> Pengakuan terhadap peran hukum adat, yang terbentuk melalui dinamika kehidupan masyarakat, menjadi landasan penting bagi masyarakat lokal, seperti suku Dayak di Pulau Kalimantan, dalam menjaga keseimbangan dan harmoni dalam hidup berkomunitas.<sup>41</sup>

Idealnya, perencanaan pemindahan Ibu Kota Negara, penting untuk mempertimbangkan kondisi sosial yang beragam dan dinamis, serta memastikan bahwa masyarakat lokal tidak merasa terpinggirkan atau terasingkan. Faktor-faktor seperti rendahnya pendidikan dan kualitas sumber daya manusia lokal, serta kurangnya informasi yang mereka miliki, menjadi tantangan dalam upaya pemberdayaan masyarakat lokal. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang terencana dan terarah untuk

---

<sup>40</sup> Peppres No. 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.

<sup>41</sup> Rusmin Tumanggor (2007). Pemberdayaan kearifan lokal memacu kesetaraan komunitas adat terpencil. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Volume 12, Nomor 1.



meningkatkan partisipasi dan kesiapan masyarakat dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Negara yang baru. Secara konseptual, implementasi pemberdayaan masyarakat lokal dapat diorganisir dalam tiga kategori utama, yaitu *Skilling*, *Upskilling*, dan *Reskilling Empowerment*, dengan uraian sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. *Skilling*. Merujuk pada pemberian ketrampilan dasar kepada masyarakat yang belum menguasai keterampilan tertentu, seperti ketrampilan wirausaha, desain grafis, teknisi listrik, dan pertukangan. Penting untuk memperhatikan bakat dan minat individu dalam mempersiapkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Jenis ketrampilan yang dikembangkan termasuk *hard skill*, *soft skill*, *upskilling*, dan *reskilling*, yang mencakup *technical skill*, *management skill*, *entrepreneur skill*, dan *personal skill*.
- b. *Upskilling*. Bertujuan memberikan keterampilan tambahan kepada individu untuk menduduki posisi pekerjaan yang lebih tinggi, baik saat ini maupun di masa depan. *Upskilling* membantu menutupi kesenjangan keterampilan sebelumnya dengan mempersiapkan individu untuk tugas-tugas baru. Ini melibatkan pengembangan keterampilan baru agar individu dapat beradaptasi dengan perubahan dalam melaksanakan tugas mereka secara lebih efektif dan efisien.
- c. *Reskilling*. Melibatkan memberikan keterampilan baru kepada individu yang keterampilan lamanya tidak relevan atau tidak sesuai dengan perubahan lingkungan, seperti keterampilan baru yang diperlukan ketika lokasi kerja terdampak oleh pembangunan IKN Nusantara. *Reskilling* mempersiapkan individu untuk beralih ke profesi baru dengan memberikan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan baru.

---

<sup>42</sup> Donald Happy Ginting dan K. P. Suharyono S.Hadiningrat, Pemberdayaan Masyarakat Lokal Perspektif Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Ibu Kota Negara Nusantara, Jurnal Lemhanas RI Volume 11, No. 4.

*Upskilling* dan *reskilling* yang dilaksanakan dengan baik diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kontribusi masyarakat dalam pembangunan IKN Nusantara, sehingga mereka dapat hidup secara mandiri dan berkontribusi pada kemajuan wilayah tersebut. Sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Regulasi ini menetapkan ketentuan tentang pembentukan dan operasional Ibu Kota Nusantara, yang akan berfungsi sebagai pusat aktivitas pemerintahan nasional serta menjadi lokasi bagi perwakilan negara asing dan berbagai organisasi atau lembaga internasional. Maka Otorita Ibu Kota Nusantara telah melakukan beberapa upaya pemberdayaan dengan memberikan pendampingan menyeluruh kepada masyarakat yang terdampak pembangunan, dengan tujuan agar mampu mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan. Pendampingan ini meliputi pelatihan pengelolaan keuangan dan kewirausahaan. Melalui Direktorat Pemberdayaan Masyarakat, Otorita IKN telah menyelenggarakan berbagai program pendampingan, seperti seminar dan pelatihan, khususnya bagi warga yang menerima ganti untung atas lahannya yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur IKN.<sup>43</sup>

Selain itu, Otorita IKN juga berupaya membantu masyarakat dengan bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK), terutama bagi warga di kawasan IKN di Kalimantan Timur, untuk menghindari ketidaksiapan dalam menghadapi perubahan yang akan terjadi dengan pemindahan ibu kota negara. Adapun program-program ini memiliki tujuan agar masyarakat dapat terlibat aktif dalam kemajuan IKN, dan komunikasi antara warga dan pemerintah perlu ditingkatkan untuk menemukan solusi terbaik dalam menghadapi masalah yang mungkin timbul. Pemberdayaan masyarakat juga dilakukan untuk mengajarkan pengelolaan keuangan dan kewirausahaan, sehingga warga yang menerima ganti untung dapat meningkatkan kesejahterannya. Program ini tidak hanya untuk warga di wilayah tertentu, melainkan juga untuk daerah-daerah sekitarnya, dengan

---

<sup>43</sup> <https://www.ikn.go.id/komitmen-otorita-ibu-kota-nusantara-untuk-selalu-dampingi-masyarakat-terdampak-pembangunan>, diakses pada 16 Mei 2024.

harapan mengurangi kesenjangan antara warga yang berada di kawasan pusat pemerintahan dan pinggirannya.<sup>44</sup>

Sementara untuk program-program pemberdayaan jangka panjang yang berkelanjutan pemerintah tengah menyiapkan beberapa program yang melibatkan lintas sektoral. Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi Tim Transisi Ibu Kota Negara, Sidik Pramono, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan 28 jenis pelatihan untuk warga di wilayah IKN. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi serta membangun jejaring kerja bagi warga lokal guna mengantisipasi dampak pembangunan IKN. Pelatihan ini diharapkan dapat mengakui kompetensi SDM di wilayah IKN melalui uji kompetensi dan sertifikasi, serta membangun jejaring kerja agar warga lokal dapat berkontribusi secara optimal saat tahap pembangunan IKN dimulai. Pelatihan tahap pertama akan menyasar 16 warga dan diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja Samarinda dan Kementerian Tenaga Kerja. Program pelatihan ini meliputi lima jenis, seperti pelatihan hidroponik, sablon, menjahit, pembuatan roti, dan barista. Sidik menambahkan bahwa peserta pelatihan ini telah diidentifikasi oleh Pemerintah Kecamatan Sepaku, dan mereka akan menjalani pelatihan dengan durasi bervariasi, rata-rata 20 hari efektif.<sup>45</sup>

Selain itu, terdapat juga pelatihan UMKM yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Industri dan Koperasi serta pembinaan pariwisata oleh Dinas Pariwisata berstandar IKN. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan masyarakat lokal dalam menghadapi dampak pembangunan IKN. Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) pada tahap awal telah diikuti sekitar 1.535 peserta. Program ini dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa SDM yang disiapkan memiliki kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan IKN.<sup>46</sup> Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat juga

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/04/05445351/pemerintah-siapkan-28-jenis-pelatihan-untuk-warga-lokal-di-ikn>, diakses pada 16 Mei 2024.

<sup>46</sup> <https://www.neraca.co.id/article/171908/pembangunan-ikn-prioritaskan-pemberdayaan-masyarakat-lokal>, diakses pada 17 Mei 2024.

dilakukan dengan berfokus pada pemberdayaan perempuan melalui beberapa program peningkatan kompetensi pelatihan di sektor Agroindustri dan Teknologi Informatika yang diinisiasi oleh BLK bekerja sama dengan beberapa pihak terkait lain.<sup>47</sup>

Meskipun program-program pemberdayaan tersebut sudah mulai dilaksanakan, namun, dalam konteks pemberdayaan sosial masyarakat pada sistem pertahanan Ibu Kota Negara masih belum ada. Hingga saat ini belum ada kebijakan atau program pemerintah yang spesifik melakukan pemberdayaan sosial guna mendukung sistem pertahanan Ibu Kota Negara. Kebijakan dan program pemberdayaan masih cenderung dilakukan dan direncanakan dalam kerangka umum pemberdayaan. Implementasi program pemberdayaan masyarakat lokal harus didasarkan pada pemahaman mendalam tentang urgensi pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat sistem pertahanan Ibu Kota Negara. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini tidak hanya membentuk fondasi yang kokoh bagi pertahanan nasional, tetapi juga memastikan bahwa kepentingan lokal diakomodasi secara efektif. Hal ini sejalan dengan teori sistem pertahanan semesta sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Teori ini menegaskan bahwa pertahanan negara bukanlah tanggung jawab militer semata, melainkan melibatkan seluruh elemen dan unsur dalam masyarakat. Dengan demikian, setiap warga negara, organisasi, dan sektor swasta memiliki peran penting dalam memastikan keamanan dan stabilitas nasional. Melalui pemberdayaan masyarakat, individu dan kelompok di berbagai lapisan masyarakat dapat diberikan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang diperlukan untuk berkontribusi secara aktif dalam upaya pertahanan negara.<sup>48</sup>

Dalam konteks pembangunan Ibu Kota Negara, sebagaimana penerapan teori Sistem Pertahanan Semesta, bahwa masyarakat lokal tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam menjaga keamanan dan stabilitas wilayah mereka.

---

<sup>47</sup> <https://dkp3a.kaltimprov.go.id/2022/12/08/perempuan-punya-peluang-besar-mengisi-pembangunan-ikn/>, diakses pada 17 Mei 2024.

<sup>48</sup> *Loc., Cit.* Setiyawan, W.B.M., Mantri, B.H. and Junaidi, A

Partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan dan pemeliharaan wilayah, seperti pelatihan kesiapsiagaan, pengawasan lingkungan, dan keterlibatan dalam program-program keamanan komunitas, akan memperkuat kapasitas pertahanan nasional secara keseluruhan. Dengan demikian, integrasi peran masyarakat dalam sistem pertahanan ini dapat menciptakan jaringan pertahanan yang lebih solid dan resilient, siap menghadapi berbagai jenis ancaman, baik militer maupun non-militer.

Selain itu, pemberdayaan masyarakat di IKN juga dapat dilakukan dengan mendorong partisipasi aktif melalui komponen cadangan dan komponen pendukung, di mana masyarakat lokal dilibatkan dalam berbagai program kesiapsiagaan dan pembangunan. Melalui pelatihan dan pembentukan unit-unit komponen cadangan dan pendukung, warga dapat berkontribusi dalam aspek keamanan, pertahanan, dan manajemen bencana, sehingga meningkatkan keterampilan dan kesiapan mereka dalam menghadapi situasi darurat. Selain itu, partisipasi dalam komponen cadangan dan komponen pendukung ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan IKN, memastikan bahwa mereka memiliki peran aktif dan signifikan dalam menjaga stabilitas serta kemajuan wilayah mereka.

Maka dari itu, penting untuk mengidentifikasi jenis program pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal. Pemberdayaan masyarakat harus dirancang untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, serta mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat. Hal ini penting untuk dilakukan guna mengidentifikasi tantangan-tantangan pemberdayaan sosial masyarakat pada sistem pertahanan Ibu Kota Negara. Adapun salah satu tantangan utama yang perlu digarisbawahi dalam pembangunan sosial di wilayah Ibu Kota Negara adalah kondisi sosial yang dinamis dan beragam di antara masyarakat lokal. Masyarakat tersebut cenderung masih

tertinggal dibandingkan dengan calon pendatang dari aparat pemerintah pusat dan perwakilan negara asing beserta keluarganya.<sup>49</sup>

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Penajam Paser Utara (2022) menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bekerja sebagai petani sawit, karet, padi, dan palawija. Sementara itu, mayoritas penduduk di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara juga bekerja sebagai petani padi, palawija, sawit, dan perikanan, dengan tambahan usaha pertambangan batu bara, perkebunan kelapa sawit, dan minyak serta gas bumi yang dikelola oleh perusahaan asing dan PERTAMINA.<sup>50</sup> Artinya demografi masyarakat tersebut cenderung bekerja sebagai petani dan belum siap untuk terlibat dalam pekerjaan di Ibu Kota. Perlu dilakukan antisipasi dan peningkatan kualitas agar masyarakat lokal mendapat kesempatan yang sama untuk bersaing dengan pendatang.

Di sisi lain, penelitian Dewi, dkk. (2020) menunjukkan bahwa tingkat kesiapan masyarakat di Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Samboja masih rendah dalam menghadapi rencana pemindahan IKN, memerlukan upaya seperti sosialisasi yang massif untuk meningkatkannya.<sup>51</sup> Hal ini diperkuat oleh pernyataan Andi Widjajanto, pengamat isu keamanan nasional, yang menekankan pentingnya integrasi penuh antara masyarakat lokal dan pendatang di IKN Nusantara. Diperlukan program-program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan visibilitas tercapainya target-target pembangunan nasional. Dengan begitu, tantangan utama adalah merespons kondisi sosial yang heterogen dan memastikan keterlibatan serta persiapan masyarakat secara menyeluruh dalam proses pembangunan IKN Nusantara.<sup>52</sup>

Jika sudah dilakukan analisa mendalam terhadap tantangan-tantangan ini, pemerintah dan lembaga terkait dapat merancang strategi

---

<sup>49</sup> *Loc., Cit.*, Donald Happy Ginting dan K. P. Suharyono S.Hadiningrat.

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Maulida R. Dewi, dkk. 2020. Analisis Kesiapan Masyarakat Kecamatan Sepaku dan Samboja Terhadap Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota* Vol.16 No 4.

<sup>52</sup> Suharyono S. Hadiningrat. (2022). *Pemindahan Ib Kota Negara Paradigma Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Kompas.



yang efektif dalam memastikan keterlibatan dan kesejahteraan masyarakat lokal, terutama dalam konteks perubahan besar seperti pemindahan ibu kota negara. Dengan memahami tantangan tersebut, langkah-langkah konkret dapat diambil untuk meningkatkan kesiapan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta memastikan keberlanjutan sistem pertahanan yang berkelanjutan dan inklusif. Secara garis besar, adapun tantangan-tantangan pemberdayaan sosial masyarakat pada sistem pertahanan Ibu Kota Negara, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kesesuaian Program dengan Kondisi Lokal. Program pemberdayaan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat agar efektif dan berdampak positif. Hal ini menjadi tantangan untuk melakukan pemetaan dan mengidentifikasi kondisi dan situasi masyarakat di Kalimantan Timur sebelum mencanangkan program-program pemberdayaan.
- b. Kesadaran Politik dalam mengoptimalkan sistem pertahanan Ibu Kota Negara. Belum ada kebijakan dan program spesifik yang diinisiasi untuk melakukan pemberdayaan masyarakat lokal Kalimantan Timur yang spesifik untuk mendukung sistem pertahanan di Ibukota Negara. Pola kebijakan pemberdayaan cenderung hanya di tataran umum dalam konteks sosial, budaya, dan ekonomi, bukan pertahanan.
- c. Partisipasi Masyarakat. Tantangan utama terletak pada peningkatan kesadaran dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan sistem pertahanan di IKN. Upaya ini mencakup pemahaman akan peran krusial mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah, baik melalui Komponen Cadangan maupun Komponen Pendukung. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi pelengkap dalam struktur keamanan, tetapi juga menjadi bagian integral yang aktif berkontribusi terhadap stabilitas dan ketahanan wilayah IKN.

d. Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat. Tantangannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang urgensi keamanan nasional dan perlunya keterlibatan aktif dalam upaya pertahanan. Selain itu, pendidikan tentang kewaspadaan dan respons dalam situasi darurat juga perlu ditingkatkan.

e. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi. Adanya disparitas dalam akses terhadap sumber daya dan kesempatan dapat menghambat upaya pemberdayaan, sehingga menciptakan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Hal ini semakin kompleks karena suku-suku asli dari Penajam Utara cenderung berada di daerah-daerah pedesaan yang masih tertinggal.

f. Manajemen konflik sosial. Pertumbuhan cepat dan migrasi dapat menciptakan ketegangan sosial antar kelompok, terutama terkait persaingan atas sumber daya, peningkatan disparitas ekonomi, dan konflik kepentingan antar komunitas. Manajemen konflik sosial harus dilakukan secara proaktif untuk mencegah eskalasi konflik yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan keamanan wilayah tersebut.

g. Integrasi Komunitas Lokal dan Migran. Upaya untuk mengintegrasikan masyarakat lokal dengan pendatang dari wilayah lain dapat menjadi kompleks dan memerlukan pendekatan yang sensitif. Tugasnya adalah untuk mencegah timbulnya ketegangan antarkelompok, memperkuat rasa solidaritas, dan mempromosikan kerjasama antar komunitas.

h. Penyesuaian terhadap Perubahan Demografi. Perubahan demografi akibat migrasi dan pembangunan infrastruktur baru dapat menimbulkan tekanan pada sistem sosial, ekonomi, dan budaya yang sudah ada sebelumnya. Hal ini memerlukan penyesuaian kebijakan dan strategi untuk memastikan ketersediaan layanan publik, lapangan kerja, perumahan, dan infrastruktur yang memadai bagi semua penduduk.

i. Peningkatan Kerawanan Keamanan. Perubahan dalam komposisi sosial dan dinamika masyarakat dapat meningkatkan risiko terhadap gangguan keamanan dan ketertiban. Hal ini memerlukan strategi pencegahan dan penanggulangan yang efektif, termasuk peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, penguatan kerjasama antarinstansi, dan pembangunan kapasitas komunitas dalam menghadapi ancaman keamanan.

j. Tantangan Budaya dan Identitas. Migrasi besar-besaran dan perubahan lingkungan sosial dapat mengancam keberlangsungan budaya dan identitas lokal, memerlukan langkah-langkah untuk melestarikan warisan budaya dan memperkuat rasa identitas masyarakat. Hal ini semakin kompleks karena pembangunan IKN akan menciptakan migrasi besar-besaran dari berbagai daerah Indonesia yang memiliki suku dan etnis yang berbeda dengan masyarakat lokal di Kalimantan Timur.

k. Kestinambungan Program. Dalam memastikan kestinambungan program pemberdayaan sosial untuk masyarakat, tantangan yang muncul adalah menciptakan strategi yang efektif untuk menjaga konsistensi dan relevansi program-program tersebut dari waktu ke waktu. Hal ini memerlukan perencanaan yang matang dan pemantauan yang berkelanjutan untuk mengevaluasi dampak program secara terus-menerus. Selain itu, faktor keuangan dan dukungan kebijakan jangka panjang juga menjadi kunci dalam memastikan kestinambungan program, karena program pemberdayaan seringkali memerlukan investasi yang signifikan dalam jangka waktu yang cukup lama.

l. Sinergitas berbagai sektor Institusi dan Lembaga. Pemeberdayaan masyarakat memerlukan melibatkan berbagai pihak karena isunya bersifat multidimensional. Maka dari itu terdapat tantangan dalam mensinergikan kebijakan dan program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan dengan berbagai kepentingan institusi dan lembaga negara, pemda, dan pihak

swasta. Tantangan sinergitas berbagai sektor institusi dan lembaga dalam pemberdayaan masyarakat mencakup kompleksitas dalam mengkoordinasikan berbagai kepentingan dan agenda yang mungkin berbeda di antara institusi dan lembaga tersebut. Hal ini dapat menciptakan hambatan administratif, politis, dan budaya yang perlu diatasi. Selain itu, kesinambungan komunikasi dan kolaborasi yang efektif antar berbagai pihak juga menjadi faktor penting dalam memastikan sinergitas yang optimal dalam pelaksanaan program pemberdayaan.

Pentingnya mengatasi tantangan ini tidak bisa diabaikan karena dampaknya dapat sangat merugikan jika dibiarkan tanpa penyelesaian yang memadai. Salah satu dampak yang mungkin terjadi jika tantangan pemberdayaan sosial masyarakat pada sistem pertahanan Ibu Kota Negara tidak diatasi adalah terganggunya stabilitas sosial dan keamanan. Ketidakpastian sosial akibat perubahan demografi dan ketegangan antar kelompok bisa memicu konflik internal yang mengganggu stabilitas regional secara keseluruhan. Dampaknya bisa berupa meningkatnya tingkat kejahatan, ketegangan etnis, atau bahkan konflik bersenjata jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi tantangan pemberdayaan sosial masyarakat pada sistem pertahanan Ibu Kota Negara dengan pendekatan yang holistik dan inklusif. Ini termasuk mengembangkan kebijakan yang memperkuat integrasi sosial, mempromosikan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, dan memberikan dukungan yang tepat kepada komunitas yang terdampak.

#### **14. Dampak pemberdayaan masyarakat dalam sistem pertahanan Ibu Kota Negara.**

Dalam merancang dan mengimplementasikan sistem pertahanan Ibu Kota Negara, penting untuk memperhitungkan dampak dari pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bukan hanya sekadar konsep sosial, tetapi juga merupakan strategi yang vital dalam memastikan keselamatan dan ketahanan suatu negara. Melibatkan

masyarakat dalam sistem pertahanan IKN tidak hanya meningkatkan rasa memiliki dan keterlibatan mereka dalam proses pertahanan, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang dalam memperkuat fondasi keamanan nasional. Dengan memberdayakan masyarakat, negara dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada secara optimal, meningkatkan kewaspadaan dan partisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan mitigasi ancaman, serta memperkuat integrasi antara kepentingan masyarakat lokal dengan kebijakan pertahanan nasional.

Hal ini sejalan dengan Teori Pemberdayaan Masyarakat yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pemberdayaan masyarakat memberikan landasan penting dalam memahami konsep pemberdayaan di konteks pertahanan negara. Max Weber, melalui gagasan kemungkinan tindakan, menyoroti bahwa individu memiliki potensi untuk mengambil alih kendali atas situasi sosial mereka. Pemberdayaan masyarakat, menurut pemikiran ini, terjadi ketika individu atau kelompok memperoleh kontrol atas jalannya kehidupan masyarakat. Dalam konteks penguatan sistem pertahanan Ibu Kota Negara, pendekatan pemberdayaan masyarakat dapat difokuskan pada peningkatan partisipasi, kemandirian, dan kontrol masyarakat terhadap kebijakan dan tindakan yang memengaruhi keamanan dan pertahanan, terutama di wilayah IKN. Langkah-langkah ini mencakup pemberian kewenangan kepada masyarakat setempat, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi, serta pembangunan semangat nasionalisme dan kesadaran akan pentingnya pertahanan nasional. Dengan demikian, teori pemberdayaan masyarakat memberikan kerangka kerja yang penting untuk memandu upaya-upaya dalam membangun sistem pertahanan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.<sup>53</sup>

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya mencakup pengembangan infrastruktur fisik, tetapi juga melibatkan SDM dan integrasi komunitas lokal dengan pembangunan tersebut. Dalam konteks ini, perlu dipertimbangkan bagaimana pemberdayaan masyarakat dapat

---

<sup>53</sup> *Loc., Cit.* Bryan S. Turner. (2012).

memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan IKN secara keseluruhan. Dengan memperhitungkan dampak dari pemberdayaan masyarakat, pembangunan IKN dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Kementerian Dalam Negeri, Dr. Thomas Umbu Pati, menyampaikan bahwa dampak pemberdayaan masyarakat lokal juga merupakan bagian dari rencana besar dari pembangunan IKN, dimulai dengan mengidentifikasi potensi ekonomi dan budaya masyarakat setempat. Konsep pemberdayaan masyarakat ini menjadi penting karena IKN di Penajam Paser Utara bukan hanya tentang pembangunan infrastruktur, melainkan juga tentang meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat lokal. Diskusi yang diinisiasi oleh Tim Transisi Otorita Ibu Kota Nusantara menyoroti isu pertanahan dan pemberdayaan masyarakat, menegaskan pentingnya mengembangkan potensi lokal dan mempersiapkan masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan IKN karena dampak dari pembangunan ini akan terdapat di berbagai sektor.<sup>54</sup>

Adapun beberapa dampak yang perlu diantisipasi terkait pertanahan dalam pembangunan IKN antara lain: *Pertama*, dalam mengantisipasi ancaman terhadap keamanan wilayah yang mungkin timbul seiring dengan pertumbuhan kawasan yang cepat akibat pembangunan IKN, diperlukan langkah-langkah keamanan yang ketat untuk melindungi infrastruktur penting seperti jalan raya, pelabuhan, dan bandara. Ancaman seperti terorisme, tindak kriminal, dan peredaran senjata ilegal perlu dipertimbangkan secara serius dalam merancang strategi keamanan yang efektif. Selain itu, perubahan dalam dinamika sosial masyarakat sekitar IKN juga perlu diperhatikan dalam konteks keamanan wilayah untuk mengurangi potensi konflik yang dapat mengganggu stabilitas wilayah secara keseluruhan.

---

<sup>54</sup> <https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/berita/detail/pembangunan-infrastruktur-di-kawasan-ikn-harus-diimbangi-dengan-pemberdayaan-masyarakat>, diakses pada 17 Mei 2024.



*Kedua*, pembangunan IKN juga mempengaruhi ketersediaan sumber daya penting untuk keperluan pertahanan, seperti peningkatan kebutuhan akan personel dan peralatan pertahanan. Tekanan pada anggaran pertahanan dan penyesuaian strategis dalam pengalokasian sumber daya yang ada menjadi perhatian yang harus diatasi. Selain itu, pembangunan IKN juga mempengaruhi distribusi sumber daya manusia yang ada, terutama dalam hal ketersediaan tenaga kerja terlatih yang diperlukan untuk menjaga keamanan wilayah dan infrastruktur kritis.

*Ketiga*, integrasi infrastruktur pertahanan seperti pangkalan militer, pusat komunikasi, dan jaringan logistik dengan struktur fisik dan tata ruang kota baru di IKN harus diperhatikan dengan cermat. Integrasi ini penting untuk memastikan bahwa kemampuan pertahanan nasional tetap tangguh dan dapat merespons ancaman dengan cepat dan efektif. Dalam konteks ini, pembangunan IKN memberikan peluang untuk mengadopsi teknologi pertahanan canggih yang terintegrasi dengan sistem kota pintar, termasuk pengawasan dan keamanan berbasis teknologi.

*Keempat*, pengelolaan data dan informasi keamanan di IKN juga harus diperhatikan dengan serius. Pembangunan infrastruktur digital di IKN harus disertai dengan langkah-langkah keamanan siber yang canggih untuk melindungi informasi sensitif terkait keamanan nasional dari risiko cyberattack dan kebocoran informasi. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga pertahanan, dan penyedia layanan teknologi sangat diperlukan dalam hal ini. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 41 menjelaskan masyarakat memiliki peran meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik.

*Kelima*, pemberdayaan masyarakat melalui Komponen Cadangan dan komponen pendukung di IKN dapat secara signifikan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman pertahanan. Dengan melibatkan warga lokal dalam pelatihan militer dasar dan lanjutan, mereka

memperoleh keterampilan kritis dalam deteksi dini, respons cepat, dan mitigasi ancaman keamanan. Program ini dirancang untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan tentang strategi pertahanan teritorial, sehingga mereka dapat menjadi bagian integral dari sistem keamanan IKN. Pendekatan ini memastikan bahwa tidak hanya aparat militer yang siap menghadapi potensi ancaman, tetapi juga warga sipil yang memiliki pemahaman dan kemampuan untuk berkontribusi dalam operasi keamanan dan pertahanan.

Dengan mempertimbangkan dan mengantisipasi dampak-dampak ini, pemerintah dapat memastikan bahwa pembangunan IKN tidak hanya memberikan manfaat sosial dan ekonomi, tetapi juga mendukung kepentingan pertahanan nasional dengan baik. Melalui perencanaan yang komprehensif dan proaktif, pemerintah dapat mengurangi risiko keamanan, memastikan kesiapan personel dan sumber daya, serta memperkuat kerja sama regional dan internasional. Dengan dampak yang luas tersebut, perlu untuk ditekankan bahwa pemberdayaan masyarakat bukan hanya strategi sosial dan ekonomi, tetapi juga komponen vital dari strategi pertahanan yang menyeluruh. Pemberdayaan masyarakat memiliki dampak signifikan terhadap sistem pertahanan Ibu Kota Negara karena masyarakat yang terlibat aktif dalam pembangunan dan pemeliharaan wilayah mereka cenderung lebih berkomitmen terhadap keamanan dan stabilitas yang dapat diantisipasi sesuai dengan intensitas dan tingkatan ancamannya.

Dalam teori ancaman, penting untuk mempertimbangkan bahwa respons masyarakat terhadap ancaman dapat bervariasi tergantung pada intensitas dan jenis ancaman yang dihadapi. Ancaman militer yang lebih langsung dan jelas mungkin memicu respons yang lebih kuat dan terkoordinasi dari masyarakat, sementara ancaman non-militer mungkin memerlukan pendekatan yang lebih kompleks dan beragam.<sup>55</sup> Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dapat dianggap sebagai strategi untuk mengurangi kerentanan terhadap berbagai jenis ancaman dengan

---

<sup>55</sup> *Loc., Cit.*, Craig A. Snyder.

melibatkan masyarakat dalam upaya pertahanan dan keamanan. Adapun secara garis besar dampak dari pemberdayaan masyarakat yang spesifik dalam sistem pertahanan Ibu Kota Negara guna mengantisipasi ancaman, mencakup:

- a. Deteksi Dini dan Respons Cepat terhadap Ancaman. Pemberdayaan masyarakat berdampak untuk membuka kesempatan bagi penduduk setempat untuk menjadi bagian aktif dari sistem keamanan, berperan sebagai mata dan telinga di lapangan. Mereka dapat memberikan informasi dini tentang potensi ancaman atau aktivitas mencurigakan, yang meningkatkan kemampuan deteksi dini dan respons cepat terhadap berbagai ancaman keamanan. Partisipasi aktif ini sangat penting dalam mencegah dan mengatasi ancaman sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
- b. Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan. Melalui pemberdayaan, masyarakat dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung upaya pertahanan. Program pelatihan dan pendidikan yang tepat dapat mempersiapkan mereka untuk berkontribusi dalam berbagai aspek pertahanan, dari bantuan logistik hingga partisipasi dalam program kesiapsiagaan bencana. Peningkatan kapasitas ini membuat mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat dari pembangunan IKN tetapi juga menjadi aktor kunci dalam menjaga keamanan dan stabilitas wilayah.
- c. Mencegah Marginalisasi dan Ketidakpuasan. Pemberdayaan masyarakat berdampak menimbulkan kesadaran dalam mencegah marginalisasi dan ketidakpuasan yang bisa menjadi sumber konflik. Ketika masyarakat merasa diberdayakan dan memiliki andil dalam proses pembangunan, mereka lebih mungkin untuk mendukung inisiatif pemerintah dan kurang rentan terhadap pengaruh negatif dari kelompok-kelompok yang berpotensi mengancam stabilitas.

Pemberdayaan ini membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama atas keamanan dan kesejahteraan wilayah mereka.

d. Penguatan Kohesi Sosial dan Ketahanan Komunitas. Pemberdayaan masyarakat memiliki dampak signifikan pada penguatan kohesi sosial dan ketahanan komunitas terhadap ancaman eksternal. Dengan terlibat aktif dalam upaya pertahanan dan pembangunan, masyarakat mengembangkan ikatan sosial yang lebih kuat dan rasa solidaritas yang tinggi. Kohesi sosial ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang stabil dan aman, di mana masyarakat bekerja sama untuk menghadapi tantangan bersama.

e. Dukungan Ekonomi Lokal untuk Pertahanan. Pemberdayaan akan berdampak di sektor ekonomi melalui pelatihan keterampilan, dukungan untuk usaha kecil, dan peningkatan akses ke pasar kerja membantu menciptakan lingkungan yang stabil dan sejahtera. Ekonomi lokal yang kuat berarti sumber daya yang lebih banyak untuk mendukung infrastruktur pertahanan dan layanan publik yang penting. Stabilitas ekonomi ini merupakan dasar penting untuk keamanan jangka panjang, sehingga pemberdayaan masyarakat juga berdampak langsung pada peningkatan kapasitas pertahanan Ibu Kota Negara.

Secara garis besar, dengan mempertimbangkan dampak pemberdayaan masyarakat yang meliputi deteksi dini terhadap ancaman, peningkatan keterampilan dan pengetahuan, serta penguatan kohesi sosial, pemerintah dapat memperkuat sistem pertahanan Ibu Kota Negara. Dengan masyarakat yang terlibat aktif dalam sistem keamanan, pengumpulan intelijen dan deteksi dini akan lebih efektif, memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap ancaman potensial. Selain itu, dengan meningkatnya keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam bidang pertahanan, mereka dapat memberikan kontribusi yang lebih berarti dalam menjaga keamanan wilayah, baik dalam hal bantuan logistik maupun partisipasi langsung dalam program-program pertahanan.

Hal ini sesuai dengan teori sistem pertahanan semesta yang sudah dijelaskan sebelumnya, dimana pemberdayaan masyarakat sesuai menciptakan sinergi antara militer dan sipil, di mana masing-masing pihak saling mendukung dan melengkapi.<sup>56</sup> Masyarakat yang diberdayakan akan lebih siap dan tanggap terhadap situasi darurat, mengurangi beban militer dan memungkinkan respons yang lebih cepat dan efektif. Dalam menghadapi ancaman yang semakin kompleks dan beragam, keterlibatan masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta menjadi krusial untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko sebelum berkembang menjadi ancaman yang lebih besar. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat tidak hanya meningkatkan keamanan lokal tetapi juga memperkuat sistem pertahanan nasional secara menyeluruh, sesuai dengan prinsip-prinsip Sistem Pertahanan Semesta.

#### **15. Upaya-upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat guna memperkuat sistem pertahanan Ibu Kota Negara**

Dalam konteks pembangunan IKN yang pesat, keterlibatan masyarakat lokal semakin penting guna memastikan bahwa pertahanan wilayah tidak hanya bergantung pada upaya militer, tetapi juga didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Pemberdayaan ini melibatkan peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kontribusi mereka terhadap keamanan dan stabilitas nasional. Dengan membekali masyarakat dengan kemampuan yang diperlukan, mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam menjaga lingkungan sekitar, mendeteksi potensi ancaman, dan bekerja sama dengan aparat keamanan untuk menciptakan suasana yang aman dan kondusif. Upaya pemberdayaan masyarakat selaras dengan teori Sistem Pertahanan Semesta, yang menekankan pentingnya peran setiap elemen masyarakat dalam pertahanan negara. Dalam sistem ini, pertahanan nasional tidak hanya menjadi tanggung jawab militer, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat sipil, organisasi non-

---

<sup>56</sup> *Loc., Cit.* Setiyawan, W.B.M., Mantri, B.H. and Junaidi, A.

pemerintah, dan sektor swasta. Masyarakat yang diberdayakan akan memiliki kesadaran dan kesiapan yang lebih tinggi dalam menghadapi berbagai jenis ancaman, baik yang bersifat militer maupun non-militer.<sup>57</sup>

Pemberdayaan masyarakat juga berperan dalam menciptakan kohesi sosial dan meningkatkan solidaritas di antara warga. Ketika masyarakat merasa dilibatkan dan memiliki peran penting dalam menjaga keamanan IKN, mereka akan lebih berkomitmen untuk mendukung upaya-upaya pertahanan. Dengan demikian, upaya pemberdayaan masyarakat tidak hanya memperkuat sistem pertahanan IKN dari segi fisik dan keamanan, tetapi juga membangun fondasi sosial yang kokoh untuk mendukung stabilitas jangka panjang. Melalui partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pemberdayaan, sistem pertahanan Ibu Kota Negara dapat menjadi lebih tangguh dan responsif terhadap ancaman. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk terus mendorong inisiatif dan program yang mendukung pemberdayaan masyarakat dalam konteks pertahanan nasional.

Seiring dengan semakin kompleksnya tantangan keamanan di era modern, pemberdayaan masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat sistem pertahanan Ibu Kota Negara. Namun, di tengah upaya tersebut, masih terdapat banyak tantangan yang perlu diatasi. Dari kesesuaian program dengan kondisi lokal hingga peningkatan kesadaran akan kepentingan pertahanan, tantangan-tantangan ini mengharuskan pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk mengambil langkah-langkah strategis guna memastikan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan efektif dan berdampak positif. Maka, diperlukan langkah-langkah konkret yang dapat mengatasi berbagai tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses pemberdayaan masyarakat.

Tantangan-tantangan yang dimaksud mengacu uraian tantangan di sub-bab 13 sebelumnya, seperti kesesuaian program dengan kondisi lokal, kesadaran politik yang belum optimal, dan partisipasi masyarakat yang masih rendah. Selain itu, tantangan juga mencakup kesadaran dan

---

<sup>57</sup> *Loc., Cit.*, Setiyawan, W.B.M., Mantri, B.H. and Junaidi, A.



pendidikan masyarakat, ketimpangan sosial dan ekonomi, manajemen konflik sosial, integrasi komunitas lokal dan migran, penyesuaian terhadap perubahan demografi, peningkatan kerawanan keamanan, tantangan budaya dan identitas, serta kesinambungan program dan sinergitas antar sektor institusi dan lembaga. Semua tantangan ini harus diatasi dengan strategi yang tepat untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung sistem pertahanan. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya:

- a. Kesesuaian Program dengan Kondisi Lokal. Untuk memastikan program pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan lokal, pemerintah harus melakukan pemetaan dan analisis sosial, ekonomi, dan budaya secara mendalam. Pendekatan ini dapat melibatkan partisipasi aktif dari komunitas lokal untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik mereka. Selain itu, perlu dibentuk tim riset lokal yang bekerja sama dengan universitas dan lembaga penelitian untuk menyusun program yang kontekstual dan relevan.
- b. Kesadaran Politik dalam Mengoptimalkan Sistem Pertahanan IKN. Pemerintah perlu merancang kebijakan dan program spesifik yang menargetkan pemberdayaan masyarakat dalam konteks pertahanan. Ini bisa dimulai dengan penyusunan kerangka kerja yang jelas untuk integrasi pemberdayaan sosial dan pertahanan. Program ini harus mencakup pelatihan keamanan dasar, simulasi tanggap darurat, dan pendidikan mengenai peran masyarakat dalam sistem pertahanan nasional.
- c. Partisipasi Masyarakat. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, diperlukan kampanye kesadaran yang komprehensif melalui media, pendidikan, dan kegiatan komunitas. Masyarakat perlu memahami pentingnya peran mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Program pelatihan dan seminar yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin lokal dapat membantu memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan

pertahanan (Komcad). Partisipasi masyarakat dalam Komcad merupakan upaya strategis untuk memperkuat pertahanan nasional dengan melibatkan warga negara sipil dalam aktivitas pertahanan. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan tanggap darurat nasional tetapi juga mempererat hubungan antara militer dan masyarakat, memperkuat kesadaran pertahanan, serta mendukung integrasi nilai-nilai patriotisme dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari warga.

d. Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat. Pemerintah perlu mengembangkan kurikulum khusus di sekolah-sekolah dan program pendidikan masyarakat yang menekankan pentingnya keamanan nasional dan keterlibatan aktif dalam upaya pertahanan. Ini termasuk pelatihan kewaspadaan dan respons darurat. Selain itu, bisa diadakan simulasi bencana dan latihan kesiapsiagaan yang melibatkan seluruh komunitas.

e. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi. Untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi, pemerintah harus memastikan distribusi sumber daya yang adil dan akses yang setara terhadap kesempatan ekonomi. Program ini harus fokus pada pengembangan ekonomi lokal, termasuk dukungan untuk usaha kecil dan menengah (UKM) di daerah-daerah pedesaan. Selain itu, perlu ada investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk masyarakat asli.

f. Manajemen Konflik Sosial. Manajemen konflik sosial harus dilakukan secara proaktif dengan membangun mekanisme resolusi konflik yang efektif. Pemerintah dapat membentuk tim mediasi yang terdiri dari tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan pakar konflik. Program-program dialog antar komunitas juga harus dipromosikan untuk mengurangi ketegangan dan mempromosikan kerjasama.

g. Integrasi Komunitas Lokal dan Migran. Untuk integrasi yang efektif, pemerintah perlu mengembangkan program yang mempromosikan interaksi dan kerjasama antara masyarakat lokal

dan pendatang. Ini bisa termasuk kegiatan kebudayaan bersama, proyek-proyek komunitas, dan forum dialog antar kelompok. Pendekatan yang sensitif dan inklusif harus diterapkan untuk membangun solidaritas dan mengurangi potensi konflik.

h. Penyesuaian terhadap Perubahan Demografi. Penyesuaian kebijakan dan strategi perlu dilakukan untuk mengakomodasi perubahan demografi. Pemerintah harus memastikan ketersediaan layanan publik yang memadai, termasuk kesehatan, pendidikan, perumahan, dan infrastruktur. Pembangunan yang inklusif harus menjadi prioritas untuk mengakomodasi semua penduduk tanpa diskriminasi.

i. Peningkatan Kerawanan Keamanan. Untuk mengatasi peningkatan kerawanan keamanan, diperlukan strategi pencegahan dan penanggulangan yang komprehensif. Ini termasuk peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang ketat, dan penguatan kerjasama antarinstansi keamanan. Pemerintah juga harus melibatkan komunitas dalam program-program pengawasan lingkungan dan pelaporan ancaman.

j. Tantangan Budaya dan Identitas. Untuk melestarikan budaya dan identitas lokal, pemerintah harus mendukung program yang mempromosikan warisan budaya, seperti festival budaya, pendidikan tentang sejarah lokal, dan dukungan untuk seni tradisional. Selain itu, perlu ada inisiatif untuk mendokumentasikan dan melestarikan bahasa dan adat istiadat lokal.

k. Kestinambungan Program. Memastikan kestinambungan program pemberdayaan memerlukan dukungan jangka panjang dan evaluasi berkala. Pemerintah harus menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk mengukur dampak program dan menyesuaikannya sesuai kebutuhan. Sumber daya yang memadai harus dialokasikan untuk menjamin bahwa program-program ini dapat berlanjut dan berkembang.

I. Sinergitas Berbagai Sektor Institusi dan Lembaga. Untuk mencapai sinergi yang efektif, pemerintah perlu membentuk forum koordinasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk institusi negara, pemerintah daerah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 juga menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dilakukan pemerintah daerah melalui program-program tertentu seperti pendidikan pertahanan serta program peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan terhadap isu pertahanan dan keamanan. Kolaborasi antar sektor harus difasilitasi melalui pertemuan rutin dan pembagian informasi yang transparan untuk memastikan semua program pemberdayaan berjalan harmonis dan saling mendukung.

Selain mengatasi tantangan-tantangan pemberdayaan tersebut, perlu juga untuk berfokus pada pemberdayaan masyarakat yang spesifik untuk kepentingan pertahanan. Sejauh ini pemerintah Indonesia memang telah melakukan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat secara umum melalui berbagai program nasional yang mencakup pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Di Kalimantan Timur, khususnya di sekitar lokasi calon Ibu Kota Negara baru, pemerintah juga tengah melaksanakan program-program pemberdayaan yang berfokus pada peningkatan kapasitas ekonomi lokal dan infrastruktur komunitas.<sup>58</sup> Sementara dari aspek pertahanan, akan dilakukan pemindahan personel TNI dan Polri ke ibu kota baru secara bertahap. Ini termasuk pembangunan infrastruktur keamanan seperti gedung Kodim dan Polres yang ramah lingkungan, serta penempatan personel yang telah melalui uji kompetensi. Selain itu, rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) juga direncanakan untuk mendukung administrasi publik dan pemerintahan yang efektif di ibu kota baru.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/04/05445351/pemerintah-siapkan-28-jenis-pelatihan-untuk-warga-lokal-di-ikn>, diakses pada 19 Mei 2024.

<sup>59</sup> <https://www.antaraneews.com/berita/3889404/melihat-kesiapan-pemindahan-ibu-kota-negara-indonesia>, diakses pada 20 Mei 2024.

Namun, hingga kini, belum ada kebijakan atau program khusus yang dirancang secara spesifik untuk memberdayakan masyarakat dalam konteks mendukung sistem pertahanan. Seiring dengan perkembangan wilayah yang pesat dan kompleksitas ancaman yang semakin beragam, masyarakat sekitar IKN harus dipersiapkan untuk menjadi bagian integral dari sistem pertahanan nasional. Program-program semacam ini tidak hanya meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab mereka terhadap keamanan dan stabilitas wilayah mereka. Dengan adanya kebijakan atau program khusus yang fokus pada pemberdayaan masyarakat untuk mendukung sistem pertahanan, baik di IKN maupun secara nasional, Indonesia dapat membangun sistem pertahanan yang lebih holistik dan inklusif. Masyarakat yang terlatih dan sadar akan peran mereka dalam pertahanan nasional dapat bertindak sebagai barisan pertahanan pertama dalam mendeteksi dan merespons ancaman.

Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 Pasal 3 menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya nasional ditujukan untuk mengubah sumber daya manusia, sumber daya alam, serta infrastruktur dan fasilitas nasional menjadi aset pertahanan negara. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua elemen ini dapat dimanfaatkan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan pertahanan nasional. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi, tetapi juga untuk membentuk masyarakat yang tanggap, siap, dan terlibat aktif dalam menjaga keamanan dan stabilitas nasional, terutama di wilayah Ibu Kota Negara yang baru. Oleh karena itu, pengembangan dan implementasi kebijakan khusus pertahanan ini merupakan langkah strategis yang krusial untuk memastikan bahwa pembangunan IKN tidak hanya membawa kemajuan ekonomi dan sosial, tetapi juga mendukung keamanan dan stabilitas nasional secara menyeluruh. Jika spesifik berfokus pada isu pertahanan, maka berikut adalah penjelasan terperinci mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan:

a. Upaya Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan Pertahanan. Melalui upaya peningkatan kesadaran dan pendidikan pertahanan, masyarakat tidak hanya diajak untuk memahami pentingnya peran mereka dalam menjaga keamanan, tetapi juga dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi berbagai ancaman. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan pertahanan di kalangan masyarakat:

1) Kampanye Kesadaran Keamanan. Mengadakan kampanye kesadaran keamanan yang bertujuan untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya keamanan nasional dan peran mereka dalam menjaga stabilitas. Kampanye ini dapat dilakukan melalui media massa, sosial media, seminar, dan lokakarya di komunitas-komunitas lokal.

2) Pendidikan Pertahanan di Sekolah. Memasukkan kurikulum pendidikan pertahanan di sekolah-sekolah lokal, yang mencakup materi tentang ancaman keamanan, tanggap darurat, dan peran warga dalam sistem pertahanan negara. Program ini akan memastikan bahwa generasi muda tumbuh dengan pemahaman yang kuat tentang pentingnya keamanan nasional.

3) Pelatihan Kesiapsiagaan Darurat. Mengadakan pelatihan kesiapsiagaan darurat secara rutin yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pelatihan ini bisa mencakup simulasi bencana, latihan evakuasi, dan teknik dasar pertolongan pertama. Melalui pelatihan ini, masyarakat akan lebih siap dalam menghadapi situasi darurat dan dapat memberikan respons yang cepat dan efektif.

b. Penguatan Kapasitas Komunitas dalam Sistem Pertahanan. Untuk memperkuat sistem pertahanan Ibu Kota Negara, penguatan kapasitas komunitas menjadi langkah yang penting dan strategis. Melalui penguatan kapasitas ini, komunitas-komunitas lokal dapat



lebih siap dan tanggap dalam menghadapi berbagai ancaman keamanan. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menguatkan kapasitas komunitas dalam mendukung sistem pertahanan nasional:

1) **Memperkuat Kelompok Keamanan Masyarakat.** Membentuk dan memperkuat kelompok-kelompok keamanan masyarakat yang sudah ada, dimana kelompok ini berfungsi sebagai pengawas lingkungan. Kelompok ini dapat dilatih oleh aparat keamanan untuk mengenali ancaman, melaporkan kegiatan mencurigakan, dan mengambil tindakan awal dalam situasi darurat.

2) **Kolaborasi dengan Aparat Keamanan.** Meningkatkan kolaborasi antara masyarakat dan aparat keamanan melalui program-program seperti patroli bersama dan forum komunikasi rutin. Kolaborasi ini akan memperkuat hubungan antara masyarakat dan pihak berwenang, serta meningkatkan efisiensi dalam menangani masalah keamanan.

3) **Pemberdayaan Melalui Teknologi.** Menerapkan teknologi dalam pemberdayaan masyarakat untuk keamanan, seperti aplikasi pelaporan cepat atau sistem pemantauan berbasis komunitas. Teknologi ini dapat digunakan untuk menghubungkan masyarakat dengan aparat keamanan secara langsung dan cepat, sehingga respons terhadap ancaman bisa lebih cepat dan terkoordinasi.

c. **Pengembangan Ekonomi Lokal sebagai Benteng Pertahanan Sosial.** Pengembangan ekonomi lokal merupakan salah satu upaya strategis dalam memperkuat sistem pertahanan sosial di Ibu Kota Negara. Dengan meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi masyarakat, potensi konflik sosial dapat diminimalisir dan ketahanan komunitas terhadap ancaman

eksternal dapat ditingkatkan. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada penciptaan lapangan kerja dan pengembangan usaha lokal, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat agar lebih mandiri dan resilient terhadap perubahan ekonomi. Berikut adalah beberapa langkah konkret dalam pengembangan ekonomi lokal sebagai benteng pertahanan sosial:

1) Dukungan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM)  
Memberikan dukungan kepada UKM lokal untuk mengembangkan ekonomi komunitas. Ekonomi yang kuat akan mengurangi kerentanan terhadap ancaman sosial, seperti kriminalitas dan radikalisme. Pemerintah bisa memberikan akses modal, pelatihan kewirausahaan, dan fasilitas pemasaran untuk memberdayakan UKM.

2) Program Ketenagakerjaan untuk Pemuda.  
Meluncurkan program ketenagakerjaan yang ditargetkan kepada pemuda, yang dapat mencakup pelatihan keterampilan, magang, dan penciptaan lapangan kerja di sektor-sektor strategis. Program ini akan mengurangi pengangguran dan meningkatkan stabilitas sosial, yang pada gilirannya memperkuat sistem pertahanan.

d. Upaya Manajemen Konflik dan Penguatan Solidaritas Sosial.  
Manajemen konflik dan penguatan solidaritas sosial merupakan elemen kunci dalam menjaga stabilitas dan keamanan di Ibu Kota Negara yang baru. Dengan pertumbuhan cepat dan perubahan demografi yang signifikan, potensi ketegangan sosial antar kelompok dapat meningkat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif untuk mencegah konflik, memfasilitasi resolusi damai, dan membangun solidaritas di antara berbagai komunitas. Langkah-langkah ini akan membantu menciptakan lingkungan yang harmonis dan aman, yang mendukung keberlanjutan pembangunan dan ketahanan nasional. Berikut ini adalah beberapa strategi penting dalam manajemen konflik dan penguatan solidaritas sosial:

1) Mediasi dan Resolusi Konflik. Mendirikan pusat mediasi dan resolusi konflik di komunitas-komunitas lokal. Pusat ini akan membantu menyelesaikan perselisihan secara damai dan mencegah eskalasi konflik yang bisa mengancam keamanan wilayah. Pelatihan mediasi dan resolusi konflik juga bisa diberikan kepada pemimpin komunitas.

2) Program Integrasi Sosial. Mengembangkan program-program yang mempromosikan integrasi sosial antara penduduk lokal dan pendatang baru. Kegiatan bersama, seperti festival budaya, olahraga, dan proyek komunitas, dapat memperkuat rasa solidaritas dan mengurangi potensi konflik. Hal ini juga perlu dilakukan dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat dan Forkopimda.

e. Upaya Penguatan Infrastruktur Keamanan dan Logistik. Penguatan infrastruktur keamanan dan logistik adalah komponen vital dalam memastikan stabilitas dan kelancaran operasional Ibu Kota Negara yang baru. Sebagai pusat pemerintahan dan administrasi, IKN memerlukan sistem keamanan yang tangguh serta jaringan logistik yang efisien untuk mendukung kegiatan sehari-hari dan menghadapi situasi darurat. Upaya ini tidak hanya menjamin keamanan fisik, tetapi juga memastikan distribusi sumber daya dan layanan penting dengan cepat dan efektif. Berikut beberapa langkah kongret yang dapat diambil:

1) Pembangunan Pos Keamanan. Membangun pos-pos keamanan di lokasi strategis di sekitar IKN. Pos ini akan menjadi titik pengawasan dan koordinasi bagi kegiatan keamanan masyarakat, serta menjadi pusat informasi bagi warga.

2) Partisipasi dalam Sistem Peringatan Dini. Mengintegrasikan masyarakat dalam sistem peringatan dini untuk kejadian darurat, seperti bencana alam atau ancaman keamanan. Ini bisa dilakukan dengan memberikan pelatihan

kepada masyarakat tentang penggunaan teknologi peringatan dini, seperti sistem peringatan SMS atau penggunaan sirene, serta menyusun perencanaan tanggap darurat bersama dengan warga setempat.

3) Pengembangan Infrastruktur Digital. Mengembangkan infrastruktur digital yang mendukung sistem keamanan, termasuk jaringan komunikasi yang aman dan sistem pemantauan berbasis teknologi. Ini mencakup pemasangan kamera CCTV di area publik dan pengembangan sistem pelaporan online.

4) Pengembangan Sistem Logistik Komunitas. Mendorong pembentukan sistem logistik komunitas yang melibatkan masyarakat dalam distribusi sumber daya penting dan barang-barang kebutuhan sehari-hari selama situasi darurat. Ini bisa mencakup pembentukan gudang penyimpanan komunitas, sistem distribusi makanan, atau sistem evakuasi darurat yang dikelola oleh warga setempat dengan bimbingan dan dukungan pemerintah setempat.

f. Peningkatan Kerjasama Antar-Instansi. Peningkatan kerjasama antar-instansi merupakan elemen kunci dalam memperkuat sistem pertahanan Ibu Kota Negara. Dengan berbagai lembaga pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat yang terlibat, koordinasi yang baik diperlukan untuk memastikan respons yang cepat dan efisien terhadap berbagai ancaman. Kolaborasi yang erat antara militer, polisi, badan intelijen, serta instansi terkait lainnya akan menciptakan sinergi yang kuat dalam menghadapi tantangan keamanan yang kompleks. Upaya peningkatan kerjasama antar-instansi ini akan membangun jaringan komunikasi yang solid, memungkinkan pertukaran informasi yang akurat, dan memastikan bahwa setiap pihak memiliki peran yang jelas dalam menjaga stabilitas nasional. Berikut langkah-langkah

konkret yang dapat dilakukan untuk memperkuat kerjasama antar-instansi dalam mendukung sistem pertahanan di Ibu Kota Negara:

1) Forum Koordinasi Antar-Sektor, Pendirian forum koordinasi antar-sektor yang melibatkan berbagai institusi dan lembaga terkait untuk secara teratur berdiskusi, berbagi informasi, dan menyusun strategi bersama. Forum semacam ini dapat menjadi wadah untuk membangun saling pengertian, mengidentifikasi kepentingan bersama, dan mencari solusi atas perbedaan pendapat atau konflik kepentingan yang mungkin timbul.

2) Pemetaan Kepentingan dan Agenda: Melakukan pemetaan kepentingan dan agenda dari masing-masing institusi dan lembaga terkait untuk memahami perspektif dan prioritas mereka. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang kepentingan masing-masing pihak, dapat diidentifikasi titik-titik kesamaan dan perbedaan, sehingga memungkinkan untuk mencari titik temu dan kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.

3) Kerjasama dengan Sektor Swasta. Mendorong kerjasama dengan sektor swasta untuk mendukung inisiatif keamanan, seperti melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang fokus pada peningkatan kapasitas keamanan masyarakat dan infrastruktur pertahanan.

Pengembangan dan implementasi kebijakan khusus pertahanan tersebut merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam konteks pembangunan Ibu Kota Negara yang pesat. Keterlibatan masyarakat lokal dalam proses ini tidak hanya diperlukan untuk memastikan kemajuan ekonomi dan sosial, tetapi juga untuk mendukung keamanan dan stabilitas nasional secara menyeluruh. Selain itu, penguatan kapasitas komunitas dalam sistem pertahanan juga menjadi langkah penting. Dengan memperkuat kapasitas komunitas, komunitas-komunitas lokal akan lebih siap dan tanggap dalam menghadapi berbagai ancaman keamanan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **16. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis sesuai dengan ketiga pertanyaan kajian, maka tulisan ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Terkait implementasi dan tantangan pemberdayaan sosial masyarakat pada sistem pertahanan Ibu Kota Negara: Pengintegrasian kearifan lokal, budaya, dan perlindungan lingkungan dalam pembangunan IKN diperlukan untuk menciptakan hubungan harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Program pemberdayaan yang meliputi *skilling*, *upskilling*, dan *reskilling*, bersama dengan pelatihan keterampilan oleh Otorita IKN, bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan, serta menjaga stabilitas dan ketahanan wilayah. Tantangan utama meliputi penyesuaian program dengan kondisi lokal, partisipasi masyarakat dalam pertahanan, dan integrasi antara masyarakat lokal dan pendatang, yang harus diatasi untuk menjaga kesinambungan program pemberdayaan dan stabilitas sosial IKN secara keseluruhan.

b. Terkait dampak pemberdayaan masyarakat dalam sistem pertahanan Ibu Kota Negara: Dengan memberdayakan masyarakat, negara tidak hanya meningkatkan partisipasi dan kontrol masyarakat terhadap kebijakan pertahanan, tetapi juga membuka peluang untuk deteksi dini, respons cepat terhadap ancaman, serta peningkatan keterampilan dalam pertahanan. Langkah ini juga mencegah marginalisasi, memperkuat kohesi sosial, dan mendukung ekonomi lokal yang stabil, yang semuanya berkontribusi pada ketahanan komunitas dan keamanan wilayah. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat bukan sekadar strategi sosial, tetapi komponen kunci dalam membangun sistem pertahanan yang efektif, berkelanjutan, dan responsif terhadap



ancaman, sesuai dengan prinsip-prinsip Sistem Pertahanan Semesta.

c. Terkait Upaya-upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat guna memperkuat sistem pertahanan Ibu Kota Negara: Pemerintah mengarahkan berbagai program untuk meningkatkan kesadaran, keterampilan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan nasional, selaras dengan teori Sistem Pertahanan Semesta. Langkah-langkah tersebut mencakup peningkatan kesadaran politik, pendidikan pertahanan, dan pelatihan tanggap darurat, yang bertujuan membentuk masyarakat yang tanggap dan siap menghadapi ancaman. Penguatan kapasitas komunitas, melalui kolaborasi dengan aparat keamanan dan pemanfaatan teknologi, juga menjadi fokus untuk menciptakan kohesi sosial dan meningkatkan solidaritas warga. Selain itu, pengembangan ekonomi lokal diprioritaskan untuk mengurangi kerentanan sosial, sementara manajemen konflik dan penguatan infrastruktur keamanan terus ditingkatkan. Namun, tantangan seperti kesesuaian program dengan kondisi lokal dan partisipasi masyarakat yang masih rendah harus diatasi dengan strategi yang tepat. Penguatan sinergi antar-instansi juga diperlukan untuk memastikan respons yang cepat dan efektif terhadap berbagai ancaman, guna menciptakan sistem pertahanan IKN yang lebih tangguh dan inklusif.

## **17. Rekomendasi**

Untuk mewujudkan sistem pertahanan Ibu Kota Negara yang kuat, diperlukan kebijakan yang terintegrasi dan sinergis dari berbagai kementerian, lembaga, dan institusi terkait, guna memastikan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat berjalan efektif dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu diambil untuk mencapai tujuan tersebut:

- a. **Integrasi Pendidikan Pertahanan dan Pelatihan Kesiapsiagaan Masyarakat.** Kementerian Pertahanan RI, BNPB, dan otoritas terkait dapat bekerja sama untuk mengintegrasikan materi pertahanan negara, tanggap darurat, dan manajemen risiko bencana ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Program ini akan mencakup pelatihan praktis seperti simulasi bencana, latihan evakuasi, serta penyuluhan manajemen risiko dan mitigasi. Pelatihan berkala di sekolah dan komunitas lokal ini akan membekali generasi muda dan masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi dalam sistem pertahanan nasional dan menghadapi situasi darurat secara efektif.
- b. **Penguatan Keamanan dan Sistem Logistik Berbasis Teknologi dan Partisipasi Masyarakat.** Otorita IKN, Kominfo RI, dan Polri dapat berkolaborasi untuk membangun infrastruktur keamanan dan sistem logistik yang melibatkan partisipasi masyarakat. Ini termasuk pembangunan pos-pos keamanan di lokasi strategis, pengembangan jaringan komunikasi aman, pemasangan CCTV, dan pengembangan sistem pemantauan berbasis teknologi. Masyarakat akan dilibatkan dalam program patroli bersama, sistem distribusi barang selama darurat, serta dalam sistem peringatan dini melalui aplikasi dan sirene. Forum komunikasi rutin antara masyarakat dan aparat keamanan juga akan memperkuat kerjasama dalam menjaga keamanan lokal dan respons cepat terhadap ancaman.

Jakarta, 20 Agustus 2024

Penulis



Heldi Wira, S.I.P., M.Si.  
Kolonel Inf Nrp 11940019030871

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1994). Sejarah Kebudayaan Kalimantan. Jakarta: CV. Dwi Jaya Karya.
- Gordon B. Davis. (2012). Analisis Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi.
- Hadiningrat, Suharyono S. (2022). Pemindahan Ibu Kota Negara Paradigma Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta: Kompas.
- Koentjaraningrat. (2009). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Snyder, Craig A. (1999). Contemporary Security and Strategy. Abingdon: Routledge.
- Thomas, Lewis dan Elaine B. Johnson. (2014). *Contextual Teaching Learning*. Jakarta: Kaifa.
- Turner, Bryan S. (2012). Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.

### Dokumen

- Bappenas. (2021). Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara. Jakarta: Bappenas.

Kementerian Pertahanan. (2022). Paparan Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan: Konsep Pembangunan Sistem Pertahanan IKN. Jakarta: Kemhan.

Mabes TNI. (2022). Rencana Pembangunan Satuan TNI di IKN. Jakarta: Mabes TNI.

Misriani dkk. (2013). Kearifan lokal Cerita Rakyat Kalimantan Timur, Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur, Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud RI.

### **Jurnal/Artikel**

Dewi, Maulida R. dkk. (2020). Analisis Kesiapan Masyarakat Kecamatan Sepaku dan Samboja Terhadap Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota* Vol.16 No 4.

Happy Ginting, Donald dan K. P. Suharyono S.Hadiningrat, Pemberdayaan Masyarakat Lokal Perspektif Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Ibu Kota Negara Nusantara, *Jurnal Lemhanas RI* Volume 11, No. 4.

Setiyawan, W.B.M., Mantri, B.H. and Junaidi, A., 2020. Optimalisasi Sishankamrata Melalui Penerapan Lima Pilar Total Defence sebagai Upaya Mewujudkan Negara Indonesia yang Berdaulat. *Borneo Law Review*, Vol. 4, No.2.

Tumanggor, Rusmin. (2007). Pemberdayaan kearifan lokal memacu kesetaraan komunitas adat terpencil. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Volume 12, Nomor 1.

Jubaidi, Ahmad H. dkk. (2018). Pencegahan Paham Terorisme dan Radikalisme Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Kalimantan Timur. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, Vol 1, No. 1.

### Website/Internet

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/27/konflik-massal-kalimantan-timur-lebih-tinggi-dibandingkan-wilayah-kalimantan-lainnya>, diakses pada 27 Maret 2024.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/29/asn-pusat-bakal-dipindahkan-bertahap-ke-ikn-bagaimana-proyeksi-penduduk-di-kalimantan-timur>, diakses pada 25 Maret 2024.

<https://disbun.kaltimprov.go.id/halaman/potensi-daerah-kabupaten-penajam-paser-utara>, diakses pada 24 April 2024

<https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/berita/detail/pembangunan-infrastruktur-di-kawasan-ikn-harus-diimbangi-dengan-pemberdayaan-masyarakat>, diakses pada 17 Mei 2024.

<https://dkp3a.kaltimprov.go.id/2022/12/08/perempuan-punya-peluang-besar-mengisi-pembangunan-ikn/>, diakses pada 17 Mei 2024.

<https://kaltim.antarane.ws.com/berita/143685/konflik-perkebunan-di-provinsi-kaltim-tergolong-tinggi>, diakses pada 27 Maret 2024.

<https://mediaindonesia.com/nusantara/557947/sesuai-budaya-dan-kearifan-lokalnya-kaltim-siap-berpartisipasi-bangun-ikn>, diakses pada 26 Maret 2024.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/07/04/05445351/pemerintah-siapkan-28-jenis-pelatihan-untuk-warga-lokal-di-ikn>, diakses pada 16 Mei 2024.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/07/04/05445351/pemerintah-siapkan-28-jenis-pelatihan-untuk-warga-lokal-di-ikn>, diakses pada 19 Mei 2024.

<https://polkam.go.id/sebagai-center-of-gravity-negara-ikn-implementasikan-smart-defence/m> diakses pada 25 Maret 2024.

<https://promkes.kemkes.go.id/?p=1490>, diakses pada 25 Maret 2024.

<https://regional.kompas.com/read/2022/04/02/134453778/profil-kabupaten-penajam-paser-utara?page=all>, diakses pada 24 April 2024.

<https://rmol.id/politik/read/2023/11/07/596322/menko-pmk-ikn-harus-pahami-kondisi-sosial-masyarakat-lokal>, diakses 1 Februari 2024

<https://www.antaraneews.com/berita/3889404/melihat-kesiapan-pemindahan-ibu-kota-negara-indonesia>, diakses pada 20 Mei 2024.

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200701231153-113-519804/australia-naikkan-anggaran-pertahanan-jadi-us-186-miliar>, diakses 21 April 2024.

<https://www.ikn.go.id/komitmen-otorita-ibu-kota-nusantara-untuk-selalu-dampingi-masyarakat-terdampak-pembangunan>, diakses pada 16 Mei 2024.

<https://www.ikn.go.id/otorita-ikn-terus-tingkatkan-keterlibatan-budaya-lokal-dan-pemberdayaan-masyarakat>, diakses 1 Februari 2024.

<https://www.kemhan.go.id/poahan/2019/07/25/pemberdayaan-sdm-bersama-satpol-pp-dan-linmas.html>, diakses pada 25 Maret 2024.

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/11/30/ksp-ikn-membutuhkan-sistem-pertahanan-cerdas>, diakses 1 Januari 2024.

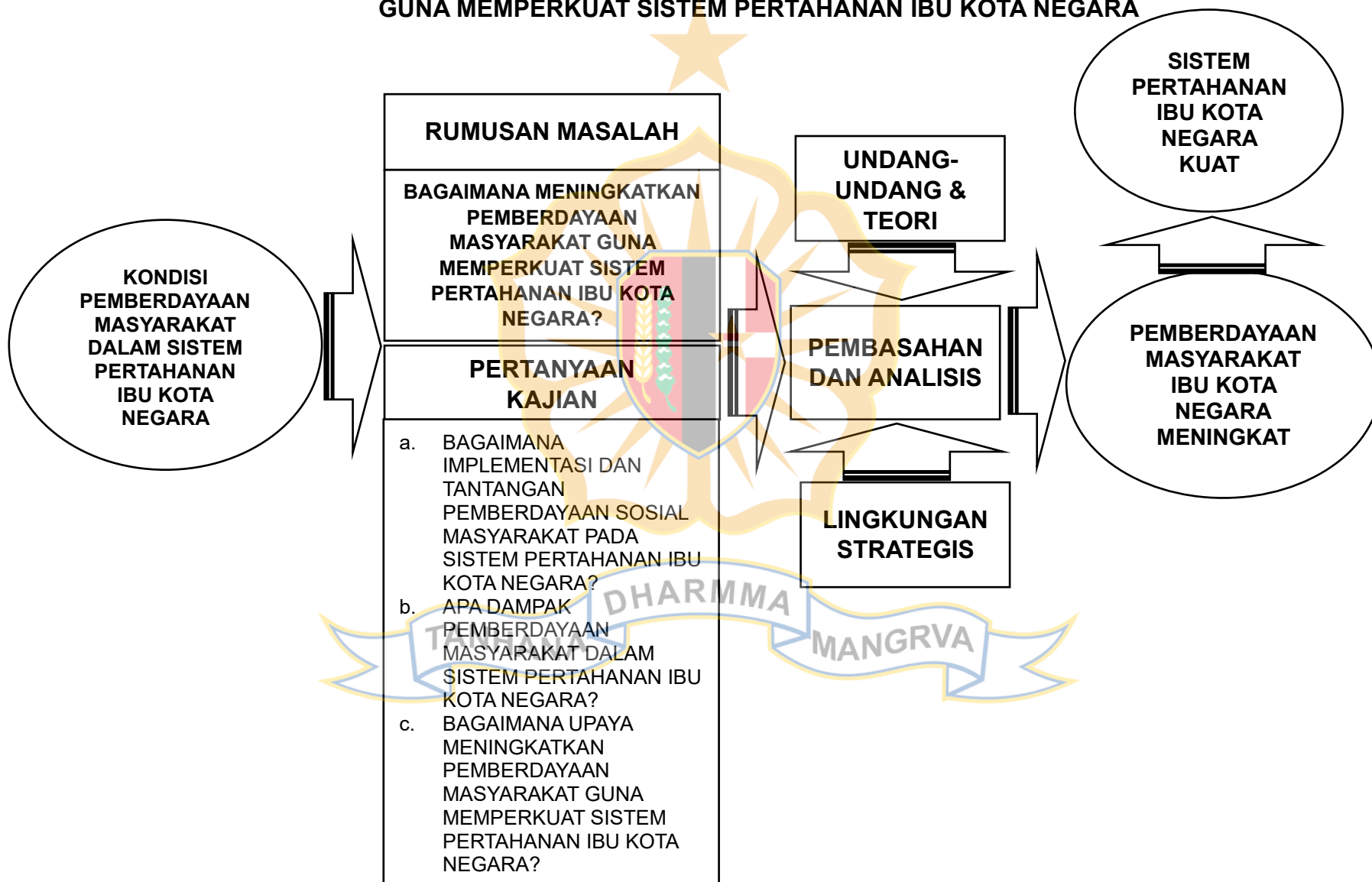
<https://www.neraca.co.id/article/171908/pembangunan-ikn-prioritaskan-pemberdayaan-masyarakat-lokal>, diakses pada 17 Mei 2024.





Lampiran 1: Alur Pikir

**MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
GUNA MEMPERKUAT SISTEM PERTAHANAN IBU KOTA NEGARA**



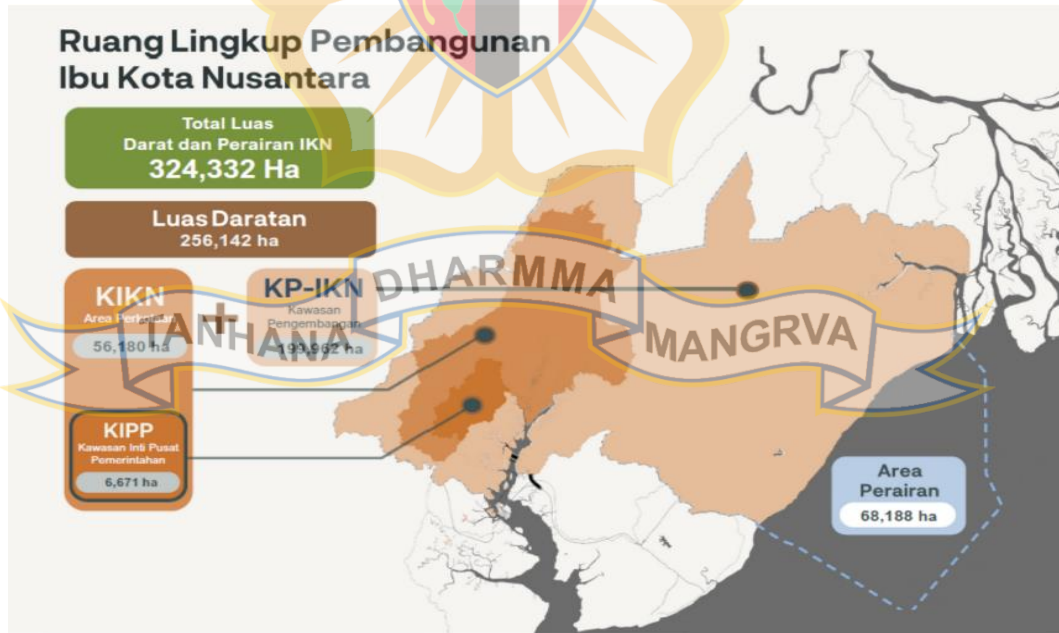
## Lampiran 2: Daftar Gambar

### Gambar 1. Tahapan Pembangunan IKN



Sumber: Buku Saku IKN (2022)

### Gambar 2. Ruang Lingkup Pembangunan Ibu Kota Nusantara



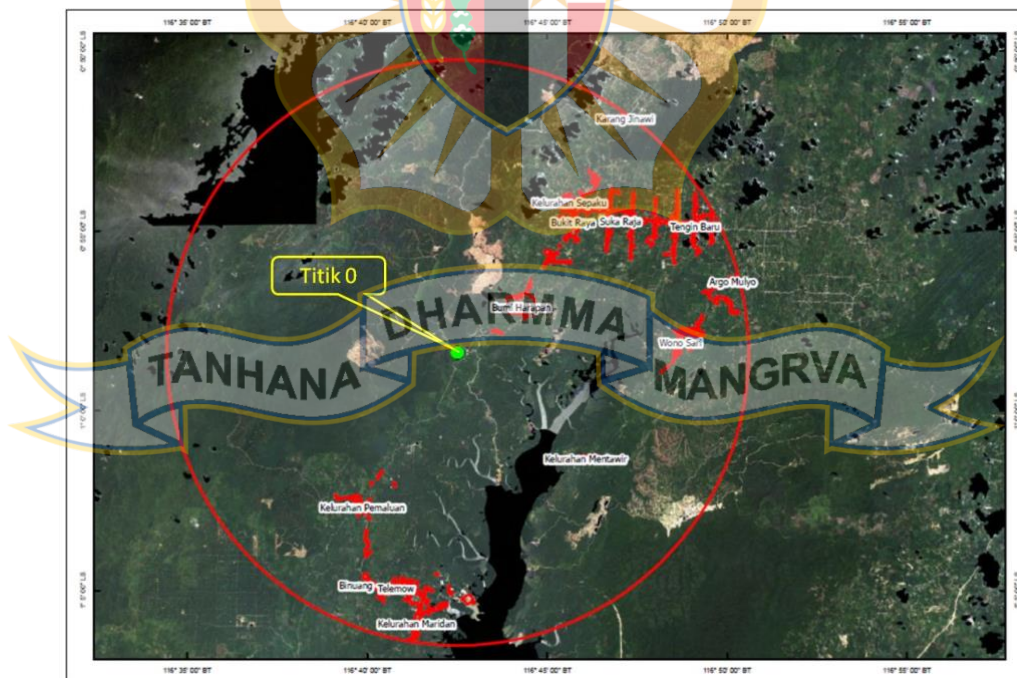
Sumber: Deputi Lingkungan dan Sumber Daya Alam. (2023). Paparan perihal Rancangan Peraturan Kepala OIKN tentang Tata Cara Pengakuan Perlindungan dan Pemajuan Kearifan Lokal dalam PPLH

Gambar 3. Tahapan Penetapan Kearifan Lokal



Sumber: Deputi Lingkungan dan Sumber Daya Alam. (2023). Paparan perihal Rancangan Peraturan Kepala OIKN tentang Tata Cara Pengakuan Perlindungan dan Pemajuan Kearifan Lokal dalam PPLH

Gambar 4. Sebaran Permukiman disekitar IKN



Sumber: Mahfudz. (2023). Paparan Sekretaris Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan perihal Perlindungan Kearifan Lokal Di Ibu Kota Negara Nusantara



**Gambar 5. Konsekuensi Pindah Ibukota terhadap Kependudukan**

KONSEKUENSI PINDAH IBUKOTA TERHADAP KEPENDUDUKAN:  
PERUBAHAN JUMLAH DAN STRUKTUR PENDUDUK

	JUMLAH PENDUDUK		KEPADATAN	USIA PRODUKTIF	PENGANGGURAN	KEMISKINAN
	L	P				
KUTAI KARTANEGARA	356.512	403.825	28 JIWA/KM <sup>2</sup>	500.857	5,96%	6,03%
PENAJEM PASER UTARA	83.281	76.105	47,82 JIWA/KM <sup>2</sup>	105.510	3,09%	7,4%
	<b>769.337</b>					
	<b>159.386</b>					

Dari 190.000 ASN Pusat, yang pindah sebanyak 126.000. Sisanya pensiun.  
Bila berpindah dengan keluarga (x4) maka **504.000** jiwa akan menjadi penduduk Kab. Kukar dan Kab. PPU, sehingga memberikan dampak pada struktur penduduk diatas.  
Namun demikian, peluang ekonomi juga akan tercipta dengan penambahan penduduk berdaya beli dan investasi.

$$(769.337 + 159.386) \text{ PENDUDUK SETEMPAT} + 504.000 \text{ ASN PUSAT DAN KELUARGA} = \mathbf{1.432.723} \text{ JIWA (peningkatan sekitar 36\%)}$$

Sumber: BPS 2018, Kemenpan RB

Jumlah usia produktif setempat ditambahkan dengan ASN dan Keluarga ASN yang berusia produktif, maka dapat dipastikan Ibukota Baru juga akan menikmati **Bonus Demografi**

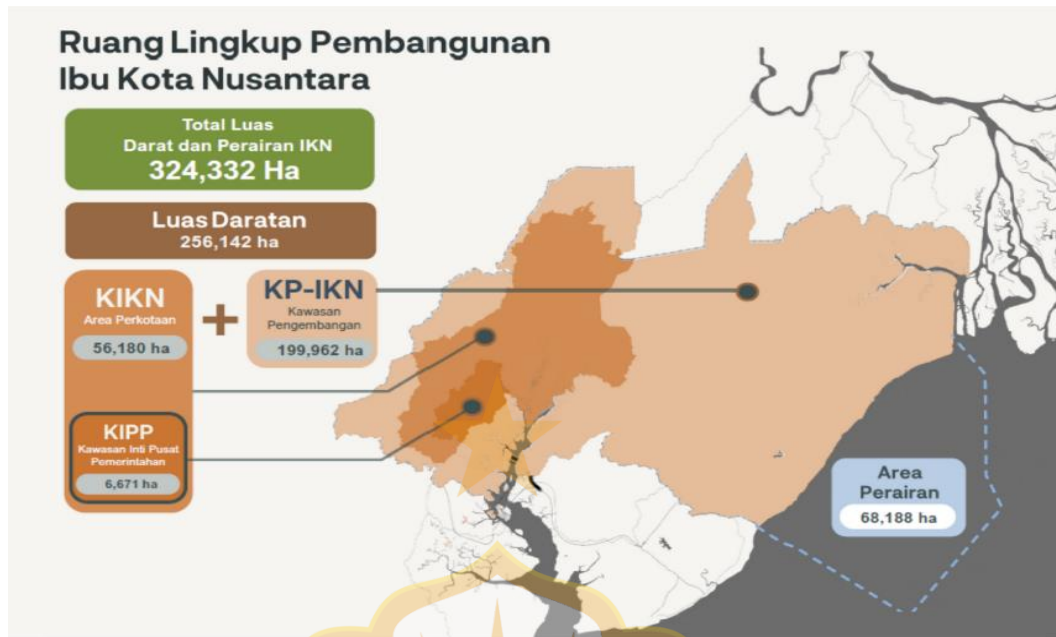
Sumber: Sonny Harry B Harmadi (Ketua Umum Koalisi Kependudukan Indonesia/Ketua Pokja Statistik Sosial FMS/Alumni PPSA 18 Lemhannas RI) dalam paparan Pembangunan IKN dalam Perspektif Demografi (2023)

**Gambar 6: Kriteria Pemilihan Kalimantan Timur**



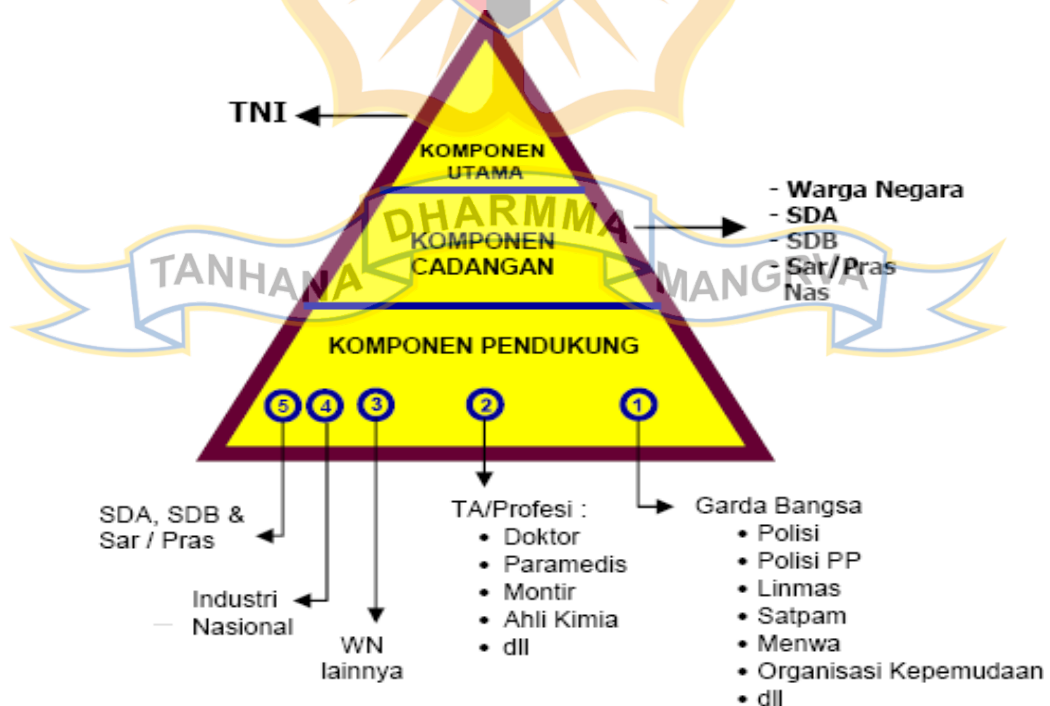
Sumber: Bappenas (2021)

Gambar 7. Ruang Lingkup Pembangunan Ibu Kota Nusantara



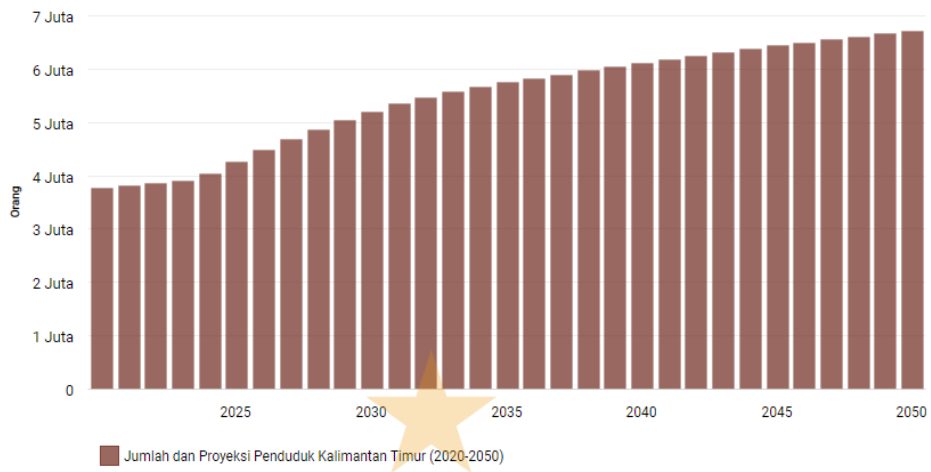
Sumber: Deputi Lingkungan dan Sumber Daya Alam. (2023). Paparan perihal Rancangan Peraturan Kepala OIKN tentang Tata Cara Pengakuan Perlindungan dan Pemajuan Kearifan Lokal dalam PPLH

Gambar 8. Komponen Pertahanan Negara

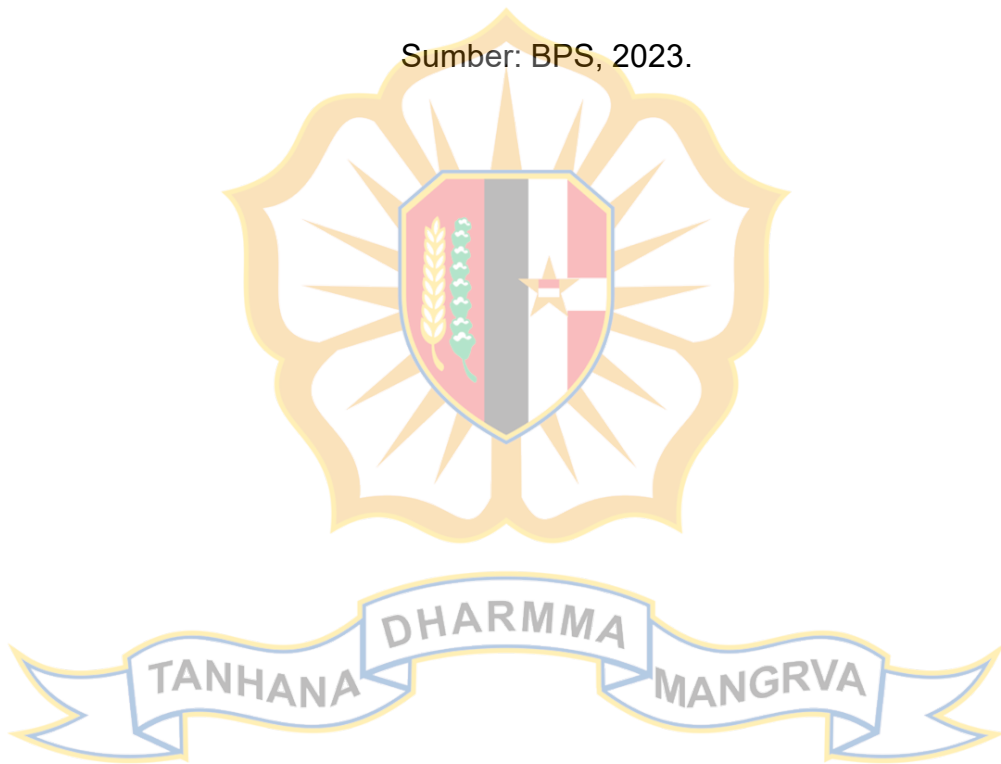


Sumber: Kemhan (2018)

**Gambar 9. Proyeksi Penduduk Kalimantan Timur (2020-2050)**



Sumber: BPS, 2023.





### Lampiran 3: Daftar Riwayat Hidup

1. NAMA : Heldi Wira, S.I.P., M.Si.
2. PANGKAT/KORPS : Kolonel Infanteri
3. NRP : 11940019030871
4. JABATAN : Pamen Denma Mabesad
5. TEMPAT/TGL LAHIR : Payakumbuh / 07 Agustus 1971
6. RIWAYAT JABATAN :



NO	JABATAN	TMT
1	PAMA PUSSENIF	28-07-1994
2	PAMA KOPASSUS	02-05-1995
3	DANTON-2 KI-1 YON-11 GRUP-1 KOPASSUS	17-09-1996
4	DANTON-2 KI-3 YON-11 GRUP-1 KOPASSUS	18-03-1997
5	KASILOG YON-13 GRUP-1 KOPASSUS	24-09-1998
6	DANKI-3 YON-13 GRUP-1 KOPASSUS	12-08-1999
7	DANKI-1 YON-13 GRUP-1 KOPASSUS	14-09-2000
8	DANKI-3 YON-12 GRUP-1 KOPASSUS	23-07-2001
9	PASIPERS GRUP 1 KOPASSUS	13-02-2002
10	PABANDA OPS SOPS KOSTARD	07-09-2004
11	WADAN YONIF 116/GARDA SAMUDERA DAM IM	26-11-2004
12	KASDIM 0114/ACEH JAYA REM 012/TU DAM IM	27-04-2007
13	PABANDA LAT SOPS DAM IM	15-02-2009
14	KASIOPS REM 064/MY DAM III/SLW	29-10-2010
15	DANYONIF 320/BP/REM 064/MY DAM III/SLW	12-08-2011
16	DANDIM 0608/CJR REM 061/MY DAM III/SLW	07-09-2012
17	KASREM 061/SK DAM III/SLW	04-04-2014
18	PABAN PAMOPS DITUM KODIKLAT TNI	14-10-2016
19	PABAN PAM DITUM KODIKLAT TNI	10-03-2017
20	ASSIAPLAT PUSLAT KODIKLAT TNI	20-10-2017
21	PAMEN DENMA MABESAD (DIKREG SESKO TNI)	11-05-2018
22	ASOPS KASDAM VI/MLW	23-08-2019
23	WAASOPS KASKOSTRAD	08-06-2020
24	PABAN II/MINOPS SOPSAD	30-12-2021